

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI AKAD
MUDHARABAH MENJADI QARDH DI KSPS BMT SURYA
MELATI GUBUG GROBOGAN
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syariah)**



Disusun oleh:

SITI ZULAIKAH

132311018

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax(024)7601291, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Zulaikah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Zulaikah
NIM : 132311018
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam terhadap Konversi Akad Mudharabah menjadi Qardh di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Juli 2017

Pembimbing I,

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Zulaikah
NIM : 132311018
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Konversi Akad Mudharabah
menjadi Qardh di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan.
Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah UIN Walisongo
Semarang, dinyatakan lulus pada tanggal:


31 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

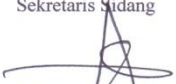
Semarang, 31 Juli 2017

Mengetahui

Ketua Sidang

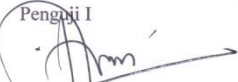

Yunita Dewi S., MA.
NIP. 197606272005012003

Sekretaris Sidang



Afif Noor, S. Ag. SH., M. Hum
NIP. 19760615 200501 1005




Penguji I


Supangat, M. Ag
NIP. 197104022005011004

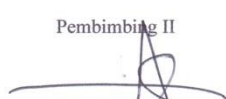
Penguji II


Drs. H. Maksud, M. Ag
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I


Moh. Arifin, S. Ag. M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II


Afif Noor, S. Ag. SH., M. Hum
NIP. 19760615 200501 1005

MOTTO

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

Dari shalih ibn Suhaib diterima dari bapaknya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: tiga perkara yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, muqaradah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tidak untuk dijual (HR. Ibnu Majjah)

PERSEMBAHAN

Teruntuk orang-orang tersayang

Penulis persembahkan karya tulis kecil ini untuk mereka yang selalu

hadir dihari-hari penulis

Orang tua tercinta

(Bapak Muh. Hafid dan Ibu Sulimah)

Kakak terkasih

(Nur Aliyah S.Pd.I., Ahmad Nahrowi)

Adik-Adik tersayang

(Ridha Fitriana, Muhammad Yusuf Maulana,

Davin Ardiansyah, dan Aditya Saputra)

Keluarga besar penulis

Sahabat-sahabat terbaik penulis

Terimakasih yang tak terhingga sehingga penulis bisa hidup dan belajar

dalam kehidupan ini

God bless Us

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin |
|-----------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| 1 | ا | Alif | Tidak dilambangkan/ a |
| 2 | ب | Ba | B |
| 3 | ت | Ta | T |
| 4 | ث | Tsa | Ts |
| 5 | ج | Jim | J |
| 6 | ح | H | H |
| 7 | خ | Kha | Kh |
| 8 | د | Dal | D |
| 9 | ذ | Dzal | Dz |
| 10 | ر | Ra | R |
| 11 | ز | Zai | Z |
| 12 | س | Sin | S |
| 13 | ش | Syin | Sy |
| 14 | ص | Shad | Sh |
| 15 | ض | Dhad | Dh |
| 16 | ط | Tha' | Th |
| 17 | ظ | Zha | Zh |

| | | | |
|----|---|--------|----|
| 18 | ع | ‘ain | |
| 19 | غ | Ghain | Gh |
| 20 | ف | Fa | F |
| 21 | ق | Qaf | Q |
| 22 | ك | Kaf | K |
| 23 | ل | Lam | L |
| 24 | م | Mim | M |
| 25 | ن | Nun | N |
| 26 | و | Wau | W |
| 27 | ه | Ha | H |
| 28 | ء | Hamzah | |
| 29 | ي | Ya | Y |

2. Vokal Pendek

َ = a كَتَبَ kataba
 ِ = i سَئِلَ su'ila
 ُ = u يَذْهَبُ yažhabu

3. Vokal Panjang

َا... = ā قَالَ qāla
 ِإِ = ī قِيلَ qīla
 ُأُ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ = ai

اَوْ = au

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 juni 2017

Deklarator



Siti Zulaikah
NIM. 132311030

ABSTRAK

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* di KSPS BMT Surya Melati berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa KSPS (*Shahibul māl*) membiayai 100% kebutuhan usaha anggota (*mudharib*). KSPS menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah* kecuali kesalahan berasal pengelola, namun dalam implementasinya, KSPS tidak benar-benar menanggung kerugian apabila usaha yang dialami oleh anggota mengalami kerugian, walaupun kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota, KSPS BMT Surya Melati justru mengkonversikan akad *mudhārabah* tersebut menjadi *qardh*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa sebab terjadinya konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari *field research* yaitu wawancara dengan kabag. Organisasi KSPS BMT Surya Melati, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur dan profil KSPS BMT Surya Melati. Teknik analisa data menggunakan deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan disebabkan karena anggota mengalami kerugian usaha *mudhārabah* bukan karena kelalaian dan kesalahannya. Alasan KSPS BMT Surya Melati Melakukan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* karena dana yang digunakan untuk pembiayaan *mudharabah* adalah dana anggota. Konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* yang ada di KSPS BMT Surya Melati belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hal tersebut karena dengan mengkonversikan akad *mudhārabah* menjadi *qardh* berarti KSPS BMT Surya Melati tidak menanggung kerugian pembiayaan *mudhārabah*,

justru anggotalah yang menanggung kerugiannya walaupun bukan karena kesalahan dan kelalaian anggota.

Kata kunci: Akad *mudhārabah*, konversi, akad *qardh*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah_Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum dan Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.

3. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Kepala kantor KSPS BMT Surya Melati dan semua karyawan KSPS BMT Surya Melati yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
5. Kedua orang tua, ayahanda Muh. Hafid dan ibunda Sulimah yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dengan penuh keikhlasan.
6. Kakak-kakakku Nur Aliyah, S.Pd.I, dan Mas Nahrowi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Adek-adekku tercinta, Ridha Fitriana, Muhammad Yusuf Maulana, Davin Ardiansyah, dan Aditya Saputra yang selalu menghibur dan menjadi hiburan tak tergantikan bagi penulis.
8. Keluarga Besar Pon. Pes Putra-Putri Al-Ma'rufiyyah, khususnya KH. Abbas Masruhin dan Hj. Maemunah terima kasih atas nasehat dan bimbingannya selama di pesantren, serta teman-teman pondok putri khususnya penghuni kamar Tahafutul Falasifah yang selalu memberikan support.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, Imut, Ikah, Mala, Nina, Isma, Avi dan Putri, semoga sukses selalu menyertai kita semua.

10. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 6 Juni 2017

Siti Zulaikah

NIM. 123311018

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vi |
| HALAMAN DEKLARASI | viii |
| HALAMAN ABSTRAK | ix |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | xi |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 13 |
| F. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN UMUM MUDHARABAH DAN | |
| QARDH..... | 18 |
| A. Mudhārabah | 18 |
| 1. Pengertian <i>mudhārabah</i> | 18 |
| 2. Dasar hukum <i>mudhārabah</i> | 20 |
| 3. Pembagian <i>mudhārabah</i> | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Rukun dan syarat <i>mudhārabah</i> | 24 |
| 5. Ketentuan <i>mudhārabah</i> | 27 |
| 6. Berakhirnya <i>mudhārabah</i> | 31 |
| 7. <i>mudhārabah</i> dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.... | 33 |
| B. <i>Qardh</i> | 42 |
| 1. Pengertian <i>qardh</i> | 42 |
| 2. Dasar Hukum <i>qardh</i> | 43 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>qardh</i> | 46 |
| 4. <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Syari'ah..... | 48 |
| C. <i>Konversi akad mudhārabah menjadi qardh</i> | 52 |
| BAB III GAMBARAN UMUM KSPS BMT SURYA MELATI | |
| GUBUG GROBOGAN..... | 55 |
| A. Profil KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan.... | 55 |
| 1. Sejarah berdirinya KSPS BMT Surya Melati | 55 |
| 2. Dasar pendirian KSPS BMT Surya Melati | 56 |
| 3. Visi dan Misi KSPS BMT Surya Melati..... | 57 |
| 4. Tujuan KSPS BMT Surya Melati | 59 |
| 5. Struktur Organisasi KSPS BMT Surya Melati | 60 |
| 6. Produk-produk KSPS BMT Surya Melati | 61 |
| B. Praktek Konversi Akad Mudharabah | |
| menjadi Qardh di KSPS BMT Surya melati Gubug | |
| Grobogan..... | 66 |

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI
AKAD MUDHARABAH MENJADI QARDH DI KSPS
BMT SURYA MELATI GUBUG GROBOGAN**

**A. Analisis Pelaksanaan Konversi Akad Mudhārabah
menjadi Qardh di KSPS BMT Surya Melati 72**

**B. Analisis Hukum Islam terhadap Konversi akad
mudhārabah menjadi Qardh di KSPS BMT Surya
Melati 79**

BAB V PENUTUP 97

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

C. Penutup 99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan ajaran yang *syāmil* (integral), *kāmil* (sempurna) dan *mutakāmil* (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya kepada manusia yang merupakan *Khalīfah* (pemimpin) di bumi, yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupun spiritual dengan landasan aqidah dan syari'ah yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan *akhlaqul karīmah* (perilaku yang mulia). Karena itu tugas khalifah dimuka bumi ini adalah untuk mengatur mekanisme kerja/ aktifitas yang ada, agar dapat berjalan secara seimbang dan adil yang mengarah pada suatu tatanan masyarakat beserta lingkungannya yang aman, tenteram dan damai serta penuh barakah dan ampunan dari Allah SWT.¹

Dunia memerlukan suatu aturan yang jelas dan terarah untuk berbagai macam bentuk aktivitasnya, di mana aturan itu berguna sebagai petunjuk pelaksanaan dari beragam aktivitas manusia, baik aktivitas yang bersifat *vertikal* (hubungan manusia dengan Tuhannya) seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, maupun aktivitas yang bersifat *horizontal* (hubungan manusia

¹ Jamal Lulail Yunus, *Managemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN-Malang Press, 2000, hlm. 3

dengan sesamanya atau dengan lingkungan alam lainnya) yang tergambar dalam bentuk hubungan sosial, budaya, politik, pertahanan, dan tak kalah pentingnya dalam masalah muamalah perekonomian. Bidang ekonomi, yang merupakan salah satu tulang punggung tegaknya tatanan masyarakat yang dinamis, mendapat perhatian yang khusus dalam konsep Islam, dimana Islam sangat memperhatikan dari bagaimana harta (hasil kegiatan ekonomi) itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan.²

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah tentunya mempunyai hikmah tersendiri di dalamnya, di mana hikmah itu akan memberikan kemaslahatan, ketenangan, dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam tidak melarang begitu saja kecuali disisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya, misalnya saja larangan terhadap riba. Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini karena riba membawa dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial dalam masyarakat.³ Alternatif yang diberikan islam dalam rangka menghapuskan riba dalam mu'amalah yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan pertama melalui shadaqah dan *qardhul hasan* (pinjaman tanpa adanya kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan) yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktivitas riba untuk keperluan biaya

² Ibid., hlm 4

³ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm. 21

hidup (konsumtif) ataupun usaha dalam skala mikro. Sedangkan jalan kedua adalah melalui sistem perbankan islam yang di dalamnya menyangkut penghimpunan dana melalui tabungan *mudhārabah*, deposito (*musyārakah*), dan giro (*wadi'ah*) yang kemudian disalurkan melalui pinjaman dengan prinsip bagi hasil (seperti *mudhārabah*, *musyārakah*), prinsip jual beli (*bai' bitsaman ajil*, *murābahah* dan lain sebagainya) serta prinsip sewa/fee seperti *ijarah* dan *ba'i ta'jiri*.⁴

Lembaga Keuangan Syari'ah seperti halnya Lembaga Keuangan Konvensional, pada dasarnya adalah lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Perbedaannya terletak pada sumber rujukan yang menjadi dasar dan pijakan lembaga keuangan syari'ah, yaitu prinsip-prinsip syari'ah atau nilai-nilai Islam dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁵

Lembaga Keuangan Syari'ah dalam operasionalnya memiliki tujuan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat, selain bertujuan untuk mencari keuntungan. Karakter lembaga keuangan syari'ah yang berfungsi *multi finance*, hal itu berarti lembaga keuangan syari'ah sangat mungkin melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di samping memperoleh keuntungan finansial. Sistem

⁴ Op.cit. 4

⁵ Neneng Nur Hasanah, *Mudhārabah dalam teori dan praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, 158

di Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya koperasi syari'ah yang *multi finance* adalah sistem yang dapat dijadikan alternatif dalam rangka mengatasi beragam kebutuhan anggotanya melalui penggunaan bermacam-macam instrumen akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, dengan demikian pemberdayaan anggota dapat dilakukan lebih optimal karena setiap potensi anggota dapat didorong dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁶

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang berstatus badan hukum yang tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang status badan hukum. Koperasi syari'ah merupakan salah satu bentuk usaha yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu yang sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. Adapun pengembangan koperasi syari'ah ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan disegala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat.⁷

Koperasi yang sudah atau akan menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan berdasar prinsip syariah telah diberi dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 8 Oktober

⁶ Ibid., hlm. 158-159.

⁷ Ibid., hlm. 180

2015 di Jakarta dan sekaligus pengganti Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama dari KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)/ UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)/USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).⁸

Produk koperasi syari'ah yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan pada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, pedagang kecil dan lainnya. Produk-produk berbasis syari'ah ini mempunyai karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk riba, dan menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas perdagangan. Produk pembiayaan KSPS diantaranya adalah *mudhārabah*, *murābahah*, *bai' bi'tsamān*, *'ajil*, dan *musyārakah*.

Dari beberapa produk pembiayaan diatas, akad *mudhārabah* lebih banyak diminati masyarakat. Pembiayaan *mudhārabah* merupakan akad pembiayaan antara Koperasi Syari'ah sebagai *shahibul māl* dan anggota sebagai *mudhārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana KSPS memberikan modal sebanyak 100%

⁸ <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-uspps-oleh-koperasi.pdf>, selasa, 7 Februari 2017, 07.52 WIB.

dan anggota menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudhārabah* antara KSPS dan anggota dengan nisbah bagi hasil sesuai yang telah disepakati pada saat akad.⁹

Lembaga Keuangan Syari'ah (termasuk KSPS) memberikan pembiayaan *mudhārabah* kepada anggotanya atas dasar kepercayaan. KSPS percaya penuh kepada anggota untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudhārabah*, karena dalam pembiayaan *mudhārabah* KSPS tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha anggota yang telah diberikan modal 100%. KSPS hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudhārib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang maksimal.¹⁰

Dalam hal pengelolaan usaha anggota berhasil mendapat keuntungan, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 maka KSPPS akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal anggota gagal menjalankan usahanya, maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul māl*, *Mudhārib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudhārib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan, kecuali dalam hal

⁹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2011, hlm. 168

¹⁰ Ibid., hlm. 169

Mudhārib melanggar syarat yang telah disepakati atau *Mudhārib* lalai dalam menjalankan usahanya.

Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudhārib* untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah (*amin*) sedangkan orang yang mendapat amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang demikian, akad *qiradh* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *qiradh*.¹¹

Dalam pembiayaan, terdapat risiko yang harus dihadapi oleh KSPPS, salah satunya adalah gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi KSPS ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Anggota mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh KSPS. Begitu pula dalam pembiayaan *mudhārabah*. Sehingga ketika ada suatu pembiayaan yang bermasalah maka pihak bank harus melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan itu.

KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan, dalam pembiayaan *mudhārabah*, apabila anggota mengalami gagal bayar pihak KSPS akan melakukan pendekatan kepada Anggotanya. Hal itu untuk mengetahui sebab kenapa anggotanya gagal bayar dan

¹¹ Ash-shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa muamalah Kontemporer*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004, hlm. 98

melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan *mudhārabah* tersebut.

KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan apabila anggota mengalami kerugian usaha *mudhārabah*, KSPS BMT Surya Melati Grobogan melakukan pendekatan dan musyawarah kepada Anggotanya tersebut, untuk mengkonversi akad *mudhārabah* menjadi akad *qardh*, di mana anggota tersebut hanya diwajibkan membayar pokok pinjaman, tanpa disertai dengan bagi hasil. Hal itu berarti anggota masih harus mengembalikan dananya, dengan kata lain apabila nasabah rugi menjalankan usahanya, KSPS BMT Surya Melati sebagai *shahibul māl* tidak ikut menanggung kerugian, justru anggota sebahai *mudhārib*lah yang menanggung seluruh kerugian.

Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan dasar pembiayaan *mudharabah*, sebagaimana fatwa DSN-MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syari'ah selama *mudhārib* tidak lalai dan tidak melanggar syarat yang telah disepakati. *Mudhārib* baru dibebankan kerugian apabila *mudhārib* terbukti lalai dan melanggar syarat yang telah disepakati.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut dan penulis berkeinginan untuk mengeksplere lebih lanjut. Maka penulis akan menuangkan dalam penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI AKAD MUDHARABAH

MENJADI QARDH DI KSPS BMT SURYA MELATI GUBUG GROBOGAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan judul yang diangkat penulis, maka dapat dirumuskan pokok penelitian yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa sebab terjadinya konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS Surya Melati Gubug Grobogan?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan sebab terjadinya konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam mengenai konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan.

Adapun manfaat penelitiannya yaitu:

1. Bagi penulis, Bagi penulis sendiri bermanfaat sebagai penambah wawasan, menerapkan dan mengembangkan seluruh teori ilmu yang telah diperoleh semasa perkuliahan dan mendapatkan pengalaman pengetahuan dan ketrampilan khususnya mengenai konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan.
2. Bagi *pihak* KSPS BMT Surya Melati penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai produk pembiayaan yang akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh*.
3. Bagi pihak lain, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah yang peneliti gunakan adalah berasal dari skripsi-skripsi yang membahas atau yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan, di antaranya:

Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Ali Murtadlo, Dosen Jurusan mu'amalah Fakultas syari'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Menela'ah *mudhārabah* Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam". Jurnal ini membahas mengenai prinsip

dasar dan penerapan pembiayaan akad *mudhārabah* dalam masyarakat. Serta resiko yang akan diterima oleh perbankan islam dan masyarakat karena akad tersebut.¹²

Ahya Faridatun Ulfa (122311021) dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Risiko Pembiayaan Macet di KJKS BMT Al-Fath Pati”, Skripsi ini membahas mengenai pembebanan resiko kerugian pembiayaan *mudhārabah* yang tidak dibebankan kepada *shahibul māl* ataupun *mudhārib*, tetapi dibebankan kepada karyawan BMT, yang dalam hal ini adalah pihak ke-3. ¹³ Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah dalam penelitian tersebut penanggungan kerugian oleh pihak ketiga, sedangkan dalam penelitian ini penanggungan resiko oleh *mudharib*.

Laili Tsulutsul Uula Darobi (12380058) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan *Mudhārabah* di BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Jogjakarta”. Skripsi ini menjelaskan mengenai jaminan yang digunakan dalam pembiayaan *mudhārabah* dan

¹² Ali Murtadlo, *Menelaah mudhārabah sebagai acuan Kerja Perbankan*, Semarang: Al-Ahkam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2012 hlm. 63-77.

¹³ Ahya Faridatun Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Risiko Pembiayaan Macet di KJKS BMT Al-Fath Pati*, UIN Walisongo Semarang, 2016

kesepakatan bagi hasil dalam pembiayaan *mudhārabah*.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah penelitian tersebut penulis lebih terfokus kepada penggunaan jaminan dan bagi hasil dalam pembiayaan *mudhārabah*, sedangkan dalam penelitian ini terfokus kepada penanggungan resiko kerugian *mudhārabah*.

Inayatun Nisa (112311004) “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudhārabah* pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Cemerlang Weleri Kendal)” Skripsi ini membahas tentang keabsahan pada pembiayaan *mudhārabah* yang tidak memberikan modal 100 persen pada produk sektor pertanian.¹⁵ Perbedaannya disini adalah dalam penelitian tersebut penulis fokus pada modal *mudhārabah* sedangkan penelitian ini fokus pada penanggungan kerugian *mudhārabah*.

Sejauh penelusuran hasil penelitian yang penyusun teliti, belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang penanggungan resiko kerugian pembiayaan *mudhārabah* kepada *mudhārib* dengan cara mengkonversikan akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS, khususnya KSPPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud

¹⁴ Laili Tsulutsul Uula, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul* Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁵ Inayatun Nisa, *Analisis Pelaksaaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Cemerlang Weleri Kendal)*, UIN Walisongo Semarang, 2016.

untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai analisis hukum islam terhadap konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan, kaitannya dengan fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhārabah*.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bila ditinjau dari tempat dilakukannya penelitian. Adapun ditinjau dari jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹⁶ Sedangkan format desain penelitian yang dipakai yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105

antara fenomena yang diselidiki.¹⁷ Sedangkan penelitian kualitatif adalah Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹⁸ Penulis mengumpulkan data sebagai penelitian dalam hal ini adalah KSPS BMT Surya Melati Grobogan.

2. Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.¹⁹ Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan mengenai konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian

¹⁷ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1999, hlm. 63

¹⁸ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

¹⁹ Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 108.

yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁰ Dalam skripsi ini yang akan dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan analisis hukum islam terhadap konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibuthkandalam rangka mencapai tujuan penelitian, di antaranya menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Interview

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²¹ Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan dan jelas dari informan.²² Dalam hal ini penulis melakukan interview kepada pihak KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan dan Anggota KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-cataan mengenai data pribadi

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm. 95

²² Djama'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 130

responden.²³ Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website, dan lain-lain.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini, Penulis membuat sistematika penulisan menjadi lima Bab, dimana tiap Bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab kemudian tiap-tiap sub mempunyai beberapa sub. Sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Mudharabah dan Qardh

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian *Mudhārabah*, Landasan Hukum *Mudhārabah*, Rukun dan Syarat-Syarat *Mudhārabah*,

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 112

Bentuk-bentuk Akad *Mudhārabah*, berakhirnya *Mudhārabah*, pengaplikasian *Mudhārabah* dalam LKS, pengertian Qardh, dasar hukum Qardh, Syarat dan Rukun Qardh dan Pengaplikasian Qardh daam LKS.

BAB III : Konversi Akad Pembiayaan Mudharabah menjadi Qardh di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran konversi akad pembiayaan *Mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan.

BAB IV : Alalisis hukum islam terhadap Konversi Akad Mudharabah menjadi Qardh di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hukum islam terhadap Konversi akad *Mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati Grobogan.

BAB V : Akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Berisikan Kesimpulan seputar penulisan skripsi, Saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH, QARDH DAN KONVERSI AKAD MUDHARABAH MENJADI QARDH

A. Mudharabah

1. Pengertian

Mudhārabah merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syari'ah. Istilah *mudhārabah* memiliki banyak pengertian, baik secara etimologi maupun terminologi. *Mudhārabah* berasal dari kata *dharb* , yang berarti memukul atau berjalan. Kemudian disebut *al-dlarb fi al-ardli* yaitu berjalan untuk melakukan perniagaan.¹

Mudhārabah disebut juga sebagai *qiradl*, Secara terminologis *mudhārabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal 100% yang disebut dengan *shahibul māl*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*Mudhārib*). Bagi hasil dari hasil kerjasama dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.²

¹ Rachmadi Utsman, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah*, Bandung:PT Citra Adikarya Bakti, 2009, hlm. 209

² Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2011, hlm. 83

Pengertian *mudhārabah* menurut para ulama' dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, Para Ulama' dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian *mudhārabah* atau *qiradh* sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha', *mudhārabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
 2. Menurut Hanafiyah, *mudhārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudhārabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
 3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
 4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran
-

tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

5. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudhārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk *ditijarahkan*.³

2. Dasar Hukum mudharabah

Landasan hukum *mudhārabah* adalah Al-qur'an dan Hadits, di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20 Allah SWT berfirman:

..... وَأَخْرُونا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

” (dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.⁴

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ النَّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

Dari shalih ibn Suhaib diterima dari bapaknya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *tiga perkara yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, muqaradah (mudhārabah), dan*

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 136-137

⁴ Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 02

*mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tidak untuk dijual.*⁵

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي (رواه الدارقطني ورجاله ثقات)

Dari Hakim bin Hizam bahwa ia pernah mensyaratkan kepada mitra kerjanya yang ia berikan modal qiradh, ucapannya adalah “*jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan janga membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu diantaranya maka engkau harus menanggung modalku (jika terjadi apa-apa).* (HR. Al-Daruquthni dengan rawi-rawi yang tsiqah)⁶

Praktik *mudhārabah* sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, bahkan Nabi juga melakukan praktik *mudhārabah*, yaitu antara Nabi dan Khadijah. Saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad saw ke Negeri Syam. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul māl*)

⁵ Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani , *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, Jakarta: Al-Birr Press, 314 H

⁶ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul maram*, diterjemahkan Lutfi Arif dkk, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), 2015, hlm. 541

sedangkan nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhārib*).⁷

Adapun landasan *ijma'* ulama' tentang kebolehan *mudhārabah* ini adalah riwayat dari jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara *mudhārabah*. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya karena harta yang diamanahkan itu bisa berkembang. Konsensus itu dapat dilihat pula pada perbuatan Umar ibn Khattab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah dan Ubaidillah secara *mudhārabah*. Wahbah Az Zuhayli menjelaskan bahwa *mudhārabah* diqiyaskan kepada *musāqah* (kerja sama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap hasil dibagi menurut kesepakatan).⁸

mudhārabah merupakan salah satu akad kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and lost sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal, sedangkan yang kedua yaitu memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/ manajemen dana usaha (proyek) halal tertentu, yang disebut *mudhārib*.⁹

⁷ Hendi Suhendi, hlm. 139.

⁸ Rozalida, , *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016 hlm. 207

⁹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 32

3. Pembagian Mudharabah

Secara umum *mudhārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqoyyadah*.

a. Mudhārabah mutlaqoh

mudhārabah mutlaqoh adalah bentuk kerja sama antara antara *shahibul māl* dan *mudhārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama' Salafus Saleh sering dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul māl* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.¹⁰ Disini *shahibul māl* memberikan kekuasaan kepada *mudhārib* untuk melakukan usaha sesuai kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syari'ah dengan modal yang diberikan kepadanya.

b. Mudhārabah muqayyadah

Mudhārabah muqayyadah yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul māl* dan *mudhārib* dengan memberikan batasan, seperti persyaratan bahwa *mudhārib* harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu atau memberi barang dari orang tertentu.¹¹

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pranedamedia Group, 2013, Hlm. 197-198

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Hlm. 227

4. Rukun dan Syarat Mudhārabah

Menurut ulama' syafi'iyah, rukun *mudhārabah* ada enam¹², yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibul māl*);
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang-barang yang diterima dari pemilik barang (*mudhārib*);
- c. Akad *Mudhārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal;
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
- f. Keuntungan.¹³

Sedangkan syarat-syarat *mudhārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudhārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudhārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai;
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuf*, maka dibatalkan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan;

¹² Hendi Suhendi, hlm. 139

¹³ Ibid, hlm. 140

- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat;
- e. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan dibagi dua dan kabul dari pengelola;
- f. *Mudhārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudhārabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudhārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudhārabah* itu rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal *mudhārabah* tersebut sah.

Sedangkan dalam modal ditetapkan 4 Syarat, yaitu:

- a. Modal mesti berupa mata uang yang berlaku dalam muamalah. Penetapan syarat ini disebabkan karena

mudhārabah bagian dari syirkah, sedangkan syirkah itu tidak sah kecuali dengan mata uang, tidak boleh dengan barang dari perlengkapan rumah atau yang diraiyatkan menurut jumhur, sebagai upaya dari pencegahan ketidaktahuan keuntungan waktu pembagian.

- b. Harta atau modal diketahui ukurannya. Apabila tidak diketahui maka *mudhārabah* menjadi tidak sah. Karena ketidaktahuan modal akan membawa kepada ketidakjelasan keuntungan.
- c. Modal mesti sesuatu yang hadir buakn berupa hutang. Tidak sah *mudhārabah* atas utang dan harta yang tidak ada secara ittifaq.
- d. Modal diserahkan kepada mudhārib agar dapat berusaha dengan modal tersebut. Hal ini disebabkan karena harta adalah amanat yang diberikan kepada *mudhārib*. Oleh karena itu mudharabh tidak sah kecuali ada penyerahan modal.¹⁴

Keuntungan sendiri disyaratkan:

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan sejenisnya;

¹⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 60

- b. Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal;
- c. Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati;
- d. Keuntungan untuk dua orang yang berakad;
- e. Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.¹⁵

Adapun syarat dan rukun *mudhārabah* sebagaimana di jelaskan oleh Majelis Ulama' Indonesia adalah sebagai berikut;

- a. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum;
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

5. Ketentuan mudharabah

Beberapa ketentuan berkaitan dengan *mudhārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a. Status benda yang berada ditangan *mudhārib* yang diterima dari *shahibul māl* adalah modal. *Mudhārib* berkedudukan sebagai wakil *shahibul māl* dalam menggunakan modal yang diterimanya, sedangkan

¹⁵ Rozalida, Hlm. 210

keuntungan yang dihasilkan dalam *mudhārabah* adalah menjadi milik bersama.

b. Kebolehan dan ketidak bolehan sebagai *mudhārib* adalah sebagai berikut.

- 1) *Mudhārib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung;
- 2) *Mudhārib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan;
- 3) *Mudhārib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang;
- 4) *Mudhārib* diperbolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan *harat mudharabah* jika mendapat izin dari *shahibul māl* dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu;
- 5) *Mudhārib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad *mudhārabah*;
- 6) *Mudhārib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem *syari'ah*;
- 7) *Mudhārib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad;

- 8) *Mudhārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad;
 - 9) *Mudhārib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi;
 - 10) *Mudhārib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang;
 - 11) *Mudhārib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali mendapat izin dari *shahibul māl*.
 - 12) *Mudhārib* tidak boleh mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan *mudhārabah*, kecuali jika sudah menjadi kebiasaan dikalangan pelaku usaha.
- c. kewajiban *mudhārib* dalam akad *mudhārabah* adalah sebagai berikut:
1. *Mudhārib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *shahibul māl* dalam akad;
 2. *Mudhārib* wajib bertanggung jawab atas risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas dari yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

3. *Mudhārib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada *shahibul maal* yang menjadi hak *shahibul māl* dalam kerja sama *mudhārabah*.
- d. Hak-hak pemilik modal (*shahibul māl*)
- 1) *Shahibul māl* berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad;
 - 2) *Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudhārabah, dan pemberhentian kerja sama oleh shahibul māl diberitahukan kepada mudharib;*
 - 3) *Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudhārib yang telah meninggal dunia;*
- e. Pembiayaan, keuntungan, dan penyelesaian sengketa.
- 1) biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudhārib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama dibebankan kepada modal dari *shahibul māl*;
 - 2) kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudhārib* dibebankan kepada *shahibul māl*;
 - 3) kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudhārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudhārib* dibebankan kepada pemilik modal;

- 4) keuntungan modal usaha yang menggunakan modal campuran dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak;
- 5) perselisihan antara shahibul māl dan mudhārib dapat diselesaikan dengan perdamaian dan atau pengadilan.

6. Berakhirnya mudhārabah

Hal lain yang perlu disajikan berkaitan dengan masalah *mudhārabah* ini adalah masa berakhirnya *mudhārabah*. Akad *mudhārabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal *mudhārabah* itu dibatasi waktunya, maka *mudhārabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan;
- b. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri;
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, apabila pengelola atau pemilik modal meninggal dunia, menurut jumhur ulama' *mudhārabah* menjadi batal. Hal ini disebabkan karena akad *mudhārabah* meliputi *wakalah*, sedangkal *wakalah* itu batal apabila *muwakkil* atau *wakil* meninggal dunia. Wafatnya salah satu orangyang berakad menyebabkan batalnya *mudharabah*, baik kewafatannya itu diketahui atau tidak diketahui oleh pihak lain. Hal itu disebabkan karena kematian itu merupakan pemecatan yang bersifat *hukmi*, yang tidak berdiri di atas pengetahuan, seperti *wakalah*. Namun demikian, menurut

Malikiyah, *Mudhārabah* itu tidak batal apabila pihak yang meninggal itu telah mewariskan kepada ahli waris untuk melanjutkan akad *mudhārabah*.

- d. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang ditangan mudhārib. Akad mudhārabah menjadi batal karena modal berkurang atau habis. Begitupun kalau modal diserahkan kepada orang lain, mudhārabah menjadi batal.
- e. Akad mudhārabah batal ketika shahibul māl atau mudhārib murtad. Kemudian meninggal dunia atau dihukum mati karena murtadnya, atau ia pindah keluar negeri (harbi).
- f. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudhārabah*. Jika salah satu syarat *mudhārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipengang oleh pengelola atau sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapat sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak mendapatkan upah. Jika terdapat keuntungan, keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab mpemilik modal karena pengelola ibaratnya sebagai pekerja yang hanya berhak menerima imbalan dan tidak

bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- g. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan *mudhārabah*. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika ada kerugian, karena dialah penyebab kerugian.¹⁶

7. Mudharabah dalam LKS

Akad *mudhārabah* di Lembaga Keuangan syari'ah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*).

Pada sisi Funding, *mudhārabah* diterapkan pada:

- a. Giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Ketentuan umum giro berdasarkan *mudhārabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan LKS bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola dana

¹⁶ Rozalinda, 217

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudhārib, LKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain;
 - 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
 - 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
 - 5) LKS sebagai mudhārib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
 - 6) LKS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁷
- b. Tabungan, baik tanggungan biasa ataupun tabungan berjangka, seperti tabungan haji dan qurban. Produk tabungan ini didasarkan kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa ini yang dimaksud tabungan adalah simpanan dana yang penariakannya hanya dapat dilakukan menurut syara-

¹⁷ Ahmad Ifham Shalihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 132-134

syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyetgiro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Ketentuan umum tabungan prinsip *mudhārabah* ini sebagaimana diterapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul māl* atau pemilik dana dan LKS bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola dana. Oleh karena itu, *mudhārib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syari'ah.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudhārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalam *mudhārabah* dengan pihak lain;
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai, dan bukan piutang;
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini harus dinyatakan secara tegas dan dalam bentuk

rasio persentase porsi keuntungan (nisbah bagi hasil) yang akan dibagikan kepada *shahibul māl* dan *mudhārib*.

- 5) LKS sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pengertian biaya operasional disini adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan. Tentu saja ini tidak termasuk biaya administrasi, seperti pembuatan buku tabungan, ATM, dan biaya pemeliharaan rekening karena biaya-biaya tersebut bukan termasuk biaya dalam pengelolaan dana oleh LKS sehingga tidak harus ditanggung oleh LKS.
- 6) LKS tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.¹⁸

Untuk jenis tabungan *mudhārabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan anggota yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di LKS. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh anggota penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudhārabah*, anggota mempunyai peluang mendapatkan keuntungan. Namun ia juga akan

¹⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000

menanggung risiko kehilangan modal jika LKS selaku *mudhārib* mengalami kerugian.¹⁹

- c. Deposito, baik deposito biasa atau deposito spesial, dimana dana yang dititipkan di LKS khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Pengawas Syariah No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Pada fatwa ini yang dimaksud deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota dengan LKS.²⁰

Ketentuan umum Deposito berdasarkan *mudhārabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul māl* atau pemilik dana, dan LKS sebagai *mudhārib* atau pengelola dana;
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudhārib*, LKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudhārabah* dengan orang lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang;

¹⁹ Rachmadi Utsman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah*, Bandung: PT Citra Adikarya Bakti, 2009, hlm. 158

²⁰ Op.cit, hlm. 211

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
- 5) LKS sebagai *mudhārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang mejadi haknya;
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Secara sederhana *mudhārabah* pada sisi funding ini bersifat invertasi. *Mudhārabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvertasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul māl* dengan pihak kedua yaitu LKS yang bertindak sebagai *mudhārib* yang menerima dananya, yang mana *mudhārib* boleh memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul māl* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan oleh syari'ah islam.²¹

Sementara itu, pada sisi financing, *mudhārabah* pada LKS diterapkan pada pembiayaan *mudhārabah*. Baik pembiayaan modal kerja, maupun investasi khusus. Produk pembiayaan *mudhārabah* ini didasarkan pada Fatwa Dewan

²¹ Irfan Fahmi, *Managemen Perbankan Konvensional dan Syari'ah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 40

Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhārabah* (*qiradh*).

Pembiayaan *mudhārabah* merupakan akad pembiayaan antara Koperasi Syari'ah sebagai *shahibul māl* dan anggota sebagai *mudhārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana KSPPS memberikan modal sebanyak 100% dan anggota menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudhārabah* antara KSPPS dan anggota dengan nisbah bagi hasil sesuai yang telah disepakati pada saat akad.²²

Ketentuan pembiayaan *mudhārabah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

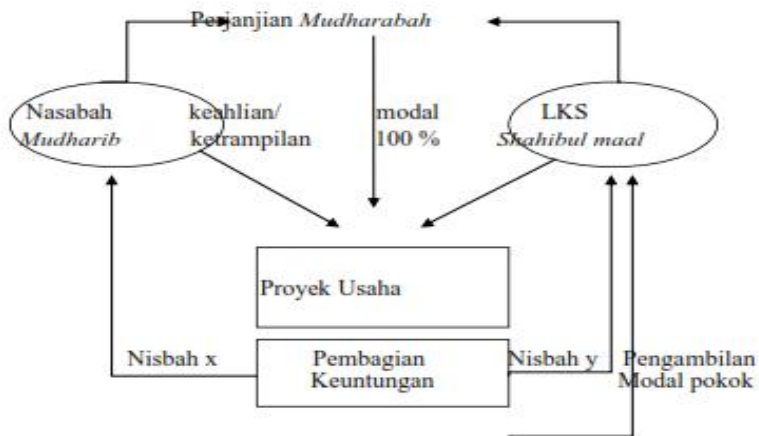
1. Pembiayaan *Mudhārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul māl* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

²² Ismail, hlm. 84

4. Mudhārib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudhārabah kecuali jika mudhārib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudhārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudhārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudhārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap

kesepakatan, *mudhārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Sesuai dengan *prinsip mudhārabah*, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudhārabah*, kecuali jika *mudhārib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Begitu pula dengan jaminan pada pembiayaan *mudhārabah* ada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun, agar *mudhārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudhārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudhārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Penggunaan *mudhārabah* dalam LKS dan mekanismenya dapat digambarkan sebagai berikut.



B. Qardh

1. Pengertian Qardh

Qardh secara bahasa berarti *qath* (potongan), dimana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta²³. Sedangkan menurut istilah *qardh* berarti meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.²⁴

Menurut Hanafiyah, *qardh* berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mistli* untuk memenuhi kebutuhannya. *Qardh* juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta *mistli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya. Menurut Wahbah al-Zuhayli, *qardh* berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengantiannya tidak ada tambahan.²⁵

Dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/PBI/2005 *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan mewajibkan pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

²³ Yadi Janwari, , hlm. 144

²⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 244

²⁵ Op.cit, hlm. 144

2. Dasar Hukum Qardh

Dalam Q.S. Al-Hadid ayat 11 Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²⁶

Selain itu, dalam Al-qur'an Surat Almaidah ayat 2 Allah juga berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²⁷

²⁶ Al-Qur'an Surat Al-Hadid Ayat 11

²⁷ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2

Selain dalam Al-qur'an keutamaan qardh juga disebutkan dalam Hadits Nabi saw:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi saw berkata: *“tidaklah seorang muslim menghutangkan hartanya kepada muslim lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan shadaqah”*.²⁸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِينَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَغْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجة)

Annas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, *“aku melihat pada waktu malam diisra’kan pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah? karena peminta-minta sesuatu dan ia*

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Jakarta Pusat: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, Hlm. 116

*punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (HR. Ibnu Majah)*²⁹

Berdasarkan nash-nash diatas, para ulama telah sepakat *tentang* kebolehan *qardh*. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberikan hutang. Seseorang boleh berutang bila dalam keadaan terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.³⁰

Disamping itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika orang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya, maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 139

³⁰ *Rozalinda, hlm. 131*

jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka dia tidak boleh berutang.³¹

3. Syarat dan Rukun Qardh

Keabsahan akad *qardh* ini terpenuhi apabila terpenuhi rukun dan syarat *qardh* itu sendiri. Rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

- a. *Muqridh* (pemberi hutang);
- b. *Muqtaridh* (orang yang berutang);
- c. *Ma'qud alaih* (barang yang diutang);
- d. Sighat ijab qabul (ucapan serah terima).³²

Sedangkan syarat-syarat *qardh* adalah:

- a. *Muqtarid* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabaru' tanpa ada penggantian;
- b. *Harta muqtarid* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan;
- c. Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru'*, sedangkan hanya sempurna dengan adanya serah terima barang;

³¹ Rozalinda, hlm. 231

³² Rozalinda, hlm. 232

- d. *Qardh* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqtarid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.³³

Qardh itu tidak boleh dalam dua keadaan. Pertama dalam *qardh* itu tidak ada *khiyar* atau *ajal*, karena *qardh* pada dasarnya adalah akad yang tidak tetap yang membolehkan pada setiap *aqid* memfasakhkannya, sehingga tidak ada *khiyar*. Jumhur ulama' kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh dalam *qardh* itu mensyaratkan *ajal*. Hal ini disebabkan jual beli mata uang dengan mata uang itu tidak boleh ditangguhkan dalam rangka untuk menghindari diri dari *riba nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan adanya penangguhan dalam *qardh*.³⁴

Kedua, *qardh* ini tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli dan yang lainnya. Hal ini ditetapkan dalam rangka menolak dari unsur *riba* atau menyerupai *riba*. Jumhur fuqaha kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa *muqtarid* diperbolehkan memberikan tambahan saat pembayaran jika tidak disyaratkan dalam akad.³⁵

³³ Yadi Janwari, hlm. 146

³⁴ Yadi Janwari, hlm. 146

³⁵ Ibid, hlm. 147

4. Qardh dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Qardh merupakan suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* merupakan akad *tathawu'* (sosial) bukan akad *tijarah* (komersial). Pada Lembaga Keuangan Syari'ah akad *qardh* diluncurkan pada produk *qardh*. Produk ini berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSNS-MUI/IV/2001 tentang *qardh*, yakni sesuatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan anggota.³⁶

Qardh dikategorikan dalam akad *ta'awun*, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. *Qardh* merupakan *produk* pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah dengan ketentuan LKS tidak boleh mengambil keuntungan berapaun darinya. LKS terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari anggota.³⁷

Pembiayaan berdasarkan akad yang bersifat sosial ini *merupakan* salah satu hal yang membedakan antara Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan

³⁶ Rozalinda, hlm. 237

³⁷ Khotibul Umam, hlm. 149

Syari'ah. LKS tidak semata-mata hanya berkeinginan memperoleh keuntungan (profit) setinggi-tingginya, tetapi juga mengemban misi sosial.³⁸

Pembiayaan *qardh* ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya dari LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.³⁹

Pengaturan dalam Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* adalah sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qardh*

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) *Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.*
- 3) *Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.*
- 4) *LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.*

³⁸ Rachmadi Utsman, Hlm. 250

³⁹ Op. Cit., hlm. 151

- 5) *Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.*
- 6) *Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:*
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau;
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

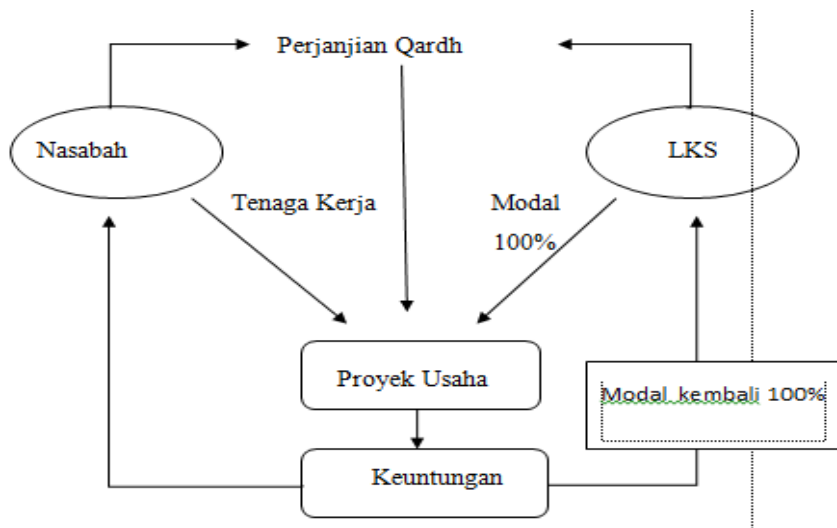
Ketiga: Sumber Dana Qardh

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan

3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.⁴⁰

Apabila anggota tidak dapat mengembalikannya itu disebabkan bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak menunjukkan keinginan untuk menunaikan kewajibannya, maka bank syari'ah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Diantara sanksi yang paling mungkin dapat direalisasi adalah dengan menjual barang jaminan. Namun, jika barang jaminan nasabah tidak mencukupi, maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.⁴¹

Skema akad qardh



⁴⁰ Fatwa DSN-MUI No19/DSN-MUI/IV/2001

⁴¹ Yadi Janwari, hlm. 150

C. Konversi Akad Mudharabah menjadi Qardh

Konversi berasal dari bahasa Inggris Conversion, yang berarti proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain.⁴² Konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* sendiri adalah proses perubahan dari akad *mudhārabah* menjadi akad *qardh*. Dalam fiqih muamalah, *mudharabah* merupakan akad *tijarah*, dan *qardh* merupakan akad *tabarru'*.

Akad *tijarah* sendiri adalah yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan. Contoh dari akad *tijarah* adalah akad-akad bagi hasil berupa *mudhārabah*, *musyārahah*, dan sebagainya, akad-akad jual beli berupa *murābahah*, *salam*, dan sebagainya, dan akad-akad sewa menyewa berupa *ijārah*, dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan

⁴² Sujana Ismaya dan Sigit Winaryo, *Kamus Perbankan*, Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2006, Hlm. 375

apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *qardh*, *wadi'ah*, *wakalah*, *rahn*, *hibah*, dan sebagainya.⁴³

Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *tabarru'* dan jenis akad *tabarru'* tidak boleh dirubah menjadi jenis akad *tijarah*. Akad *tabarru'* tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait di dalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi itu dilarang. Menggabungkan *tabarru'* dengan manfaat adalah kedzaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan definisi akadnya, sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya *riba nasi'ah*. Akad *tijarah* boleh dirubah menjadi akad *tabarru'* memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait di dalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad *tabarru'* (tanpa ada

⁴³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 66

tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan.⁴⁴

⁴⁴ Ibid, Hlm. 69

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPS BMT SURYA MELATI

GUBUG GROBOGAN

A. Profil KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan

1. Sejarah Berdirinya KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan

Lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten Grobogan yang merupakan daerah pertanian dan industri kecil membuat keprihatinan bagi beberapa kalangan. Masyarakat dan para pengusaha kecil kesulitan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Para pengusaha kecil dalam pengembangan potensinya banyak terbentur permasalahan yang rumit, di antaranya kekurangan modal, serta lemahnya manajemen.

KSPS BMT Surya Melati tumbuh dari rasa keprihatinan beberapa tokoh masyarakat Grobogan akan keadaan ekonomi masyarakat, maka dibentuklah suatu Lembaga Keuangan Syari'ah. Lembaga keuangan ini dibentuk dengan harapan bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah dan pengusaha kecil.

KSPS BMT Surya Melati merupakan salah satu di antara beberapa lembaga keuangan non bank yang ada di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. KSPS BMT Surya Melati berdiri sejak tahun 2001. Akta pendirian koperasi tertuang dalam SK Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Badan Hukum No. 115/BH/KK-4/XII/2001. Perubahan anggaran dasar ke-1 No.

03/BH/PAD/DK.11.4/VI/2006 pada tanggal 27 Juni 2006, dan Perubahan Anggaran dasar ke-2 No. 011/BH/PAD/XIV.9/2015 pada tanggal 12 Mei 2015. KSPS BMT Surya Melati terletak di Jalan Pemuda No. 55 (depan SMP-SMA Muhammadiyah), Telp. (0292-533230) sebagai kantor pusat dan mempunyai beberapa cabang yaitu di Jeketro, Karangrayung, Truko, dan Tegowanu.¹

KSPS BMT Surya Melati adalah koperasi yang berdasarkan pada syari'ah Islam dan tidak mengakui bunga yang dilarang keras dalam ajaran islam. KSPS BMT Surya Melati menerapkan bagi hasil dalam menyalurkan dana yang diperoleh. Berdasar Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan unit simpan pinjam KSPS BMT Surya Melati telah memperoleh ijin untuk melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang termasuk didalamnya adalah memberikan pembiayaan.

2. Dasar Pendirian KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan
 - a. Undang-Undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
 - b. Peraturan pemerintah RI no. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

¹ Dokumen KSPS BMT Surya Melati

3. Visi dan Misi KSPS BMT Surya Melati

a. Visi

“MENJADI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERBAIK DAN TERPERCAYA”

Makna dari visi tersebut menggambarkan semangat untuk membangun ekonomi masyarakat (umat) berbasis syariah, dalam rangka mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang baik dan terpercaya menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT.

b. Misi

1. Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang mandiri, modern, amanah, dan sejahtera

Penjelasan :

- KSPS BMT SURYA MELATI BMT Surya Melati senantiasa berupaya mewujudkan sebuah lembaga keuangan syariah yang mandiri, secara terus menerus meningkatkan jati diri, mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan bekerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas.
- Modern dari segi pelayanan, daya dukung operasional, dan sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga keuangan terkemuka.

- Amanah dalam menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip humanis transenden (hablum minallahu wa hablum minannasi).
 - Dalam melaksanakan jasa layanan lebih mengutamakan norma-norma syariat Islam, memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai tambah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta masyarakat luas.
2. Mengembangkan SDI yang tangguh, profesional, dan berdaya saing tinggi

Penjelasan :

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, BMT berupaya mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional, kompeten, memiliki integritas tinggi, berdaya saing sehingga mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional BMT

Penjelasan :

Untuk mendukung layanan keuangan syariah yang cepat, akurat, dan modern, BMT berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dengan didukung

oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang modern sesuai perkembangan zaman.

4. Menuju Masyarakat Islam Madani

Penjelasan :

Dengan adanya lembaga Keuangan KSPS BMT Surya Melati ini menjadikan masyarakat lebih membudayakan transaksi islami bukan ribawi.²

4. Tujuan KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan

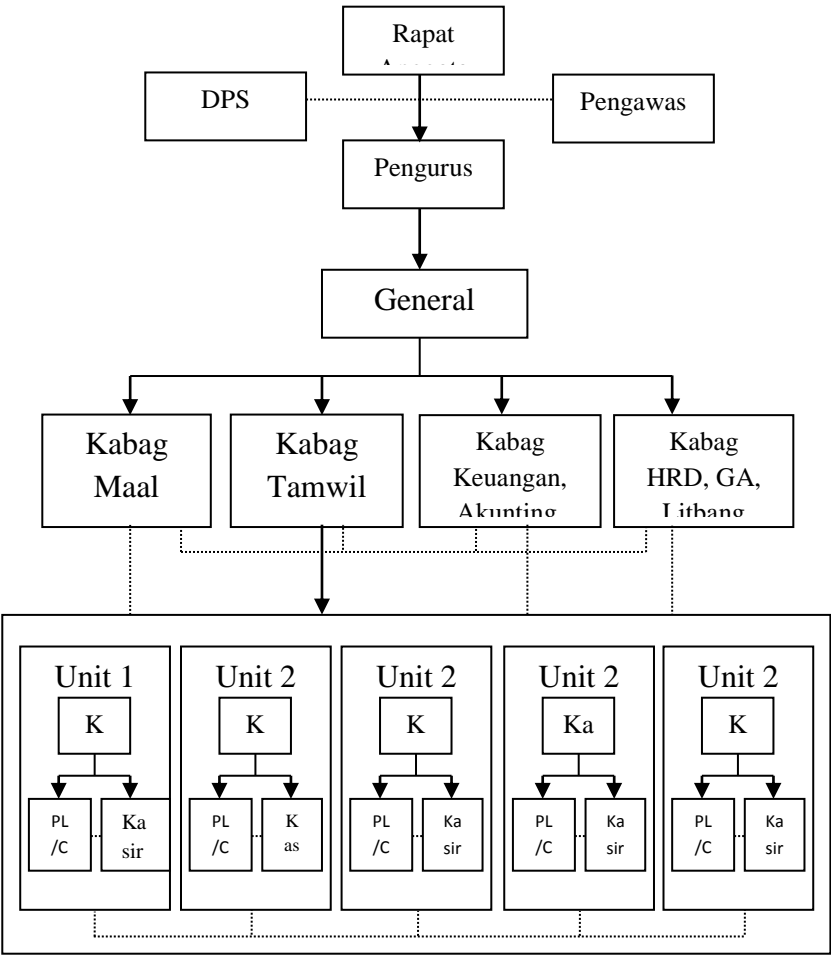
Tujuan pendirian KSPS BMT SURYA MELATI BMT Surya Melati adalah untuk meningkatkan pendapatan anggota KSPS BMT Surya Melati yang memiliki kegiatan usaha produktif melalui kegiatan usaha simpan pinjam yang bersifat profesional kepada anggota melalui:

1. Tingkat prosentase bagi hasil yang lebih rendah untuk pinjaman jika dibandingkan dengan tingkat bunga komersial atau prosentase bagi hasil lembaga keuangan lainnya.
2. Demikian halnya dengan prosentase bagi hasil simpanan, juga lebih tinggi dari tingkat bunga komersial atau prosentase bagi hasil lembaga keuangan lainnya.
3. Pemberian biaya yang lebih murah kepada anggota untuk seluruh produk usaha KSPS BMT SURYA MELATI BMT Surya Melati.

² Dokumen KSPS BMT Surya Melati

- 4. Mendapatkan pembagian SHU yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 5. Struktur Organisasi KSPS BMT Surya Melati Gubug Groboga

STRUKTUR ORGANISASI
KSPS BMT SURYA MELATI



a. Pengurus:

- 1) Ketua : Solekan, S.Pd, MM
- 2) Sekretaris : Prijanti Setijorini, S.Pd
- 3) Bendahara : Hj. Sri Eko Daruningsih, S.Pd
- 4) Pembantu I : Hj. Nur Endah S, S.Ag
- 5) Pembantu II : Drs. H. Mustofa Luthfi

b. Dewan Syari'ah:

- 1) Dewan Syari'ah I : KH. Masykuri, S.Pdi
- 2) Dewan syari'ah II : H. Haris Budiarna

c. Susunan Pengawas:

- 1) Ketua : Drs. H. Supartono, MM
- 2) Sekretaris Pengawas : Bambang Mulato, A. Md
- 3) Anggota : Hj. Wahyuni Dwi Rahayu

d. Manager Umum :Wijayanto, SH.

e. Manager Pembiayaan : Aminto

f. Kabaq. Administrasi

Keuangan : Amanah, S.kom

g. Kabag. Organisasi : Nur Khasanah, SE.

h. Karyawan : 21

6. Produk KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan

Dalam operasionalnya KSPS BMT Surya Melati mempunyai beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Produk yang tersedia meliputi produk simpanan

dan produk pembiayaan. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

a. Produk Penghimpunan dana

1. SIRELA (simpanan suka rela lancar)

SIRELA merupakan simpanan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk simpanan *wadiah*, KSPS BMT Surya Melati menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, anggota bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada KSPS BMT Surya Melati untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan KSPS BMT Surya Melati bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

2. Simpanan Mudharabah Berjangka (SISUKA)

SISUKA adalah simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. SISUKA adalah simpanan investasi dengan akad *mudhārabah* berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai

nisbah. Produk simpanan berjangka di KSPS BMT Surya Melati ini mempunyai empat jangka waktu, simpanan berjangka 1 bulan dengan bagi hasil 0,9%, simpanan berjangka 3 bulan dengan bagi hasil 1%, simpanan berjangka 6 bulan dengan bagi hasil 1,1%, dan simpanan berjangka 12 bulan dengan bagi hasil 1,2%.

3. Tabungan Siswa Wisata (TASITA)

TASITA adalah simpanan dengan setoran bulanan dalam jangka waktu tertentu yang diperuntukkan untuk pelajar. Simpanan ini Menggunakan akad *wadi'ah*, dimana anggotanya menitipkan dananya kepada KSPS BMT Surya Melati, dan dapat diambil menjelang anggota berangkat wisata.

4. Simpanan Umroh (SIMPIUM)

Simpanan haji dan umroh di KSPS BMT Surya Melati diperuntukkan kepada anggota yang berniat untuk pergi beribadah umroh ke Baitullah. Simpanan ini menggunakan akad *wadi'ah*, yang hanya boleh diambil ketika anggota akad berangkat umroh.

5. Simpanan Qurban (SISUQUR)

Simpanan *qurban* merupakan produk untuk memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin menyimpan dananya untuk persiapan

berqurban. Simpanan tersebut hanya dapat diambil menjelang hari raya *qurban* tiba. Simpanan ini menggunakan prinsip wadiah.

b. Pembiayaan

Produk penyaluran dana atau pembiayaan yang ada di KSPS BMT Surya Melati terdiri dari beberapa produk, antara lain:

1. Bai Bitsaman Ajil

Bai' bitsaman Ajil yaitu jual beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Misalkan seorang anggota ingin memiliki sebuah motor. Ia dapat datang ke KSPS BMT Surya Melati dan memohon agar KSPS BMT Surya Melati membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, pihak KSPS membelikan motor tersebut dan diberikan kepada anggota. Jika harga motor tersebut 4 juta rupiah dan KSPS ingin mendapat keuntungan Rp800.000,00 selama dua tahun, harga yang ditetapkan kepada anggota seharga Rp4.800.000,00. Anggota dapat mencicil pembayaran tersebut Rp200.000,00 per bulan.

2. Mudhārabah

Pembiayaan *mudhārabah* merupakan akad pembiayaan antara Koperasi Syari'ah sebagai *shahibul māl* dan anggota sebagai *mudhārib* untuk melaksanakan

kegiatan usaha, dimana KSPS BMT Surya Melati memberikan modal sebanyak 100% dan anggota menjalankan usahanya. KSPS BMT Surya Melati memberikan pembiayaan ini bagi anggota yang memiliki kemampuan untuk menjalankan sebuah usaha namun tidak memiliki modal. Hasil usaha atas pembiayaan *mudhārabah* dibagi antara KSPS BMT Surya Melati dan anggota dengan nisbah bagi hasil sesuai yang telah disepakati pada saat akad

3. Murabahah

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati, dimana pihak KSPS BMT Surya Melati selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual dan anggota harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

bersama sesuai kesepakatan. Pembiayaan ini diberikan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan tambahan modal. KSPS BMT Surya Melati berhak memperoleh bagi hasil atas laba yang diperoleh dengan nisbah tertentu.

5. Qardh

Qardh merupakan kegiatan penyaluran dana oleh LKS yang bersifat sosial. *Qardh* merupakan produk penyaluran dana yang disediakan oleh KSPS BMT Surya Melati untuk membantu anggotanya, dalam akad *qardh* ini KSPS BMT Surya Melati tidak mengambil keuntungan dari penyaluran dana ini. KSPS BMT Surya Melati terbatas hanya memungut biaya administrasi dari nasabah.³

B. Aplikasi Pelaksanaan Konversi Akad Mudharabah menjadi Qardh di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan

Pembiayaan *mudhārabah* di KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan dapat dilakukan melalui tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* yang telah ditentukan oleh di KSPS Surya Melati sebagaimana berikut:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan *mudhārabah* secara tertulis kepada KSPS BMT Surya Melati dengan mengisi

³ Dokumen KSPS BMT Surya Melati

dan menandatangani aplikasi (formulir) permohonan pembiayaan.

2. Anggota melengkapi semua persyaratan pengajuan pembiayaan dan dilampirkan dalam aplikasi permohonan.

Syarat Pengajuan Pembiayaan:

- a. Fotocopy E-KTP Suami dan Istri;
- b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- c. Fotocopy Jaminan:
 - 1) Fotocopy BPKB dan STNK terbaru
 - 2) Fotocopy Sertifikat dan PBB⁴

3. Apabila permohonan dirasa memenuhi syarat, anggota diwawancarai oleh pihak KSPS BMT Surya melati berkaitan dengan usaha yang akan dilakukan anggota.

4. Pihak KSPS BMT Surya Melati akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian di lapangan.

5. Apabila hasil penelitian lapangan, dokumen dan wawancara memenuhi syarat, anggota dipanggil untuk membicarakan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak. Nisbah bagi hasil yang akan diperoleh bank berkisar 1% sampai 2% sesuai kesepakatan yang diperoleh antara dua belah pihak. Anggota juga menyerahkan jaminan untuk kelengkapan dokumen akad pembiayaan *mudhārabah*.

⁴ Brosur KSPS BMT Surya Melati

6. Setelah nisbah bagi hasil disepakati anggota menandatangani akad pembiayaan *mudhārabah*.
7. Pencairan dana dari pihak KSPS BMT Surya Melati kepada anggota.

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* di KSPS Surya Melati dituangkan dalam surat perjanjian. Surat perjanjian akad tersebut ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak KSPS BMT Surya Melati dan pihak kedua selaku anggota pembiayaan *mudhārabah*. Penentuan bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* di KSPS Surya Melati ditentukan diawal perjanjian dan dalam bentuk persentase sesuai dengan jenis pembiayaan. Besarnya presentase berdasarkan kesepakatan dari pihak KSPS BMT Surya Melati dan Anggota di awal akad.

Contoh perhitungan pembayaran pembiayaan *mudhārabah*:

Pembiayaan Rp. 1.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan, maka perhitungannya adalah:

1. Akad Pembiayaan : *Mudhārabah*
2. Pembiayaan : Rp. 1.000.000
3. Jangka waktu pembayaran : 12 bulan
4. Margin : 2% per bulan.
5. Angsuran pokok : Rp. 1.000.000 dibayar secara cicilan perbulan bersama angsuran bagi hasil
6. Angsuran bagi hasil : $\text{Rp. 1.000.000} \times 2\% = \text{Rp. 20.000}$

7. Total angsuran per bulan : Rp. 20.000 per bulan + Rp 83.300
= 103.000 per bulan

Contoh di atas memberikan gambaran tentang angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar oleh pihak anggota KSPS Surya Melati Gubug Grobogan. Penentuan angsuran pokok serta margin bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan pihak KSPS Surya Melati dan anggota di awal akad.

Pihak KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh *mudhārib* apabila *mudhārib* mengalami kerugian, selama kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian *mudhārib*. Dalam hal ini *mudharib* tetap diwajibkan membayar sisa angsuran yang menjadi kewajibannya kepada KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan. Berbeda jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian *mudhārib*, yaitu kerugian yang disebabkan oleh peristiwa “overmact”.⁵

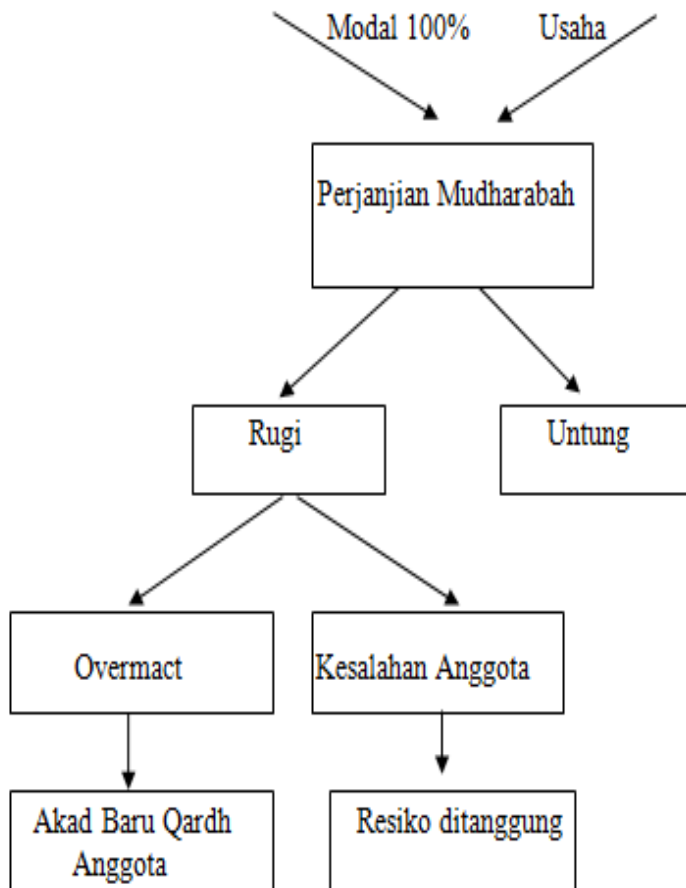
Pihak KSPS dengan persetujuan dari *mudhārib* akan melakukan konversi akad dari akad awal *mudhārabah*, dialihkan menjadi akad *qardh*. Disini pembiayaan *mudhārabah* dianggap seolah-olah sudah selesai dan di buat akad baru yaitu akad *qardh*. Pelaksanaan konversi akad pembiayaan *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS Surya Melati ini tidak dituangkan dalam surat

⁵ Wawancara dengan ibu Nur Khasanah, S.E selaku Kabag. Organisasi KSPS BMT Surya Melati, Selasa, 21 Maret 2017

perjanjian. Anggaran dalam akad *qardh* ini dibuat berdasarkan sisa modal yang masih dibawa oleh *mudhārib*.⁶

Skema konversi akad *mudharabah* menjadi *qardh*

KSPS BMT Anggota Surya Melati



⁶ Ibid, wawancara tanggal 17 April 2017

Jumlah dana yang akan dikonversikan dari akad *mudhārabah* menjadi akad *qardh* adalah sisa modal yang masih dibawa *mudhārib*. Sebagaimana contoh, konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* yang diterapkan pada pinjaman bapak Sunaryo. Bapak Sunaryo meminjam uang sepuluh juta kepada KSPS BMT Surya Melati untuk usahanya. Bapak Sunaryo memiliki usaha pembuatan roti. Pak Sunaryo dan KSPS BMT Surya Melati sudah sepakat dari awal bahwa bagi hasil pembiayaan ini adalah 2 %. Dan modal yang dibawa pak sunaryo dikembalikan kepada KSPS BMT Surya Melati dengan dicicil setiap bulannya beserta bagi hasil yang disepakati tersebut. Jangka waktu yang disepakati antara KSPS BMT Surya Melati dan pak Sunaryo adalah 24 bulan atau dua tahun.

Setiap bulan pak Sunaryo membayar cicilan ke KSPS BMT Surya Melati yaitu sebesar Rp. 416.700 ditambah dengan bagi hasilnya Rp.200.000,-. Jadi jumlah yang dibayarkan oleh pak Sunaryo setiap bulan sebesar Rp. 616.700,-. Namun setelah sepuluh kali cicilan, usaha pembuatan roti pak Sunaryo mengalami kerugian karena rumahnya terbakar. Hal itu menyebabkan pak Sunaryo tidak bisa membayar cicilan ke KSPS BMT Surya Melati. Oleh pihak KSPS BMT Surya Melati pembiayaan *mudhārabah* pak Sunaryo tadi dialihkan ke penyaluran dana *qardh*. Disini pak Sunaryo mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan ke KSPS BMT Surya Melati sejumlah Rp. 417.000,- tiap bulannya.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI AKAD
MUDHARABAH MENJADI QARDH DI KSPS BMT SURYA
MELATI GUBUG GROBOGAN

A. Analisis Sebab Terjadinya Konversi Akad Mudharabah menjadi Qardh di KSPS BMT Surya Melati

Pembiayaan *mudhārabah* merupakan produk penyaluran dana dari LKS untuk membantu usaha nasabah melalui penyediaan modal usaha. *mudhārabah* sendiri merupakan salah satu akad kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and lost sharing principle*). *Mudhārabah* dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal, sedangkan yang kedua yaitu memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/ manajemen dana usaha (proyek) halal tertentu, yang disebut *mudharib*.¹

Bagi hasil dari pembiayaan *mudhārabah* ini dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara *shahibul māl* dan *mudhārib*. Pembiayaan *mudhārabah* ini diberikan atas dasar kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudhārabah*, karena dalam pembiayaan *mudhārabah* KSPS tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha anggota yang telah diberikan modal 100%. KSPS hanya dapat memberikan

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, Hlm. 32

saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang maksimal.²

Begitu pula dalam KSPS BMT Surya Melati, dalam hal pembiayaan *mudhārabah* KSPS BMT Surya Melati Bertindak Sebagai *shahibul māl*, dan anggota bertindak sebagai *mudhārib*. KSPS BMT Surya Melati menyediakan modal usaha untuk anggota, dan anggota yang mendapatkan modal tersebut memiliki *skill* atau keahlian untuk usaha. Bagi hasil dari usaha tersebut dihitung sesuai nisbah yang disepakati antara KSPS BMT Surya Melati. KSPS BMT Surya Melati memberikan pembiayaan *mudhārabah* kepada anggota atas dasar kepercayaan, karena dalam hal anggota melakukan usaha, pihak KSPS BMT Surya melati tidak ikut campur di dalamnya. KSPS BMT Surya Melati hanya dapat memberikan nasehat yang berupa saran kepada anggota dalam usahanya.

Secara umum *mudhārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqoyyadah*. *Mudhārabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara antara *shahibul māl* dan *mudhārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. *Mudhārabah muqayyadah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul māl* dan *mudhārib* dengan memberikan batasan.³

² Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2011, hlm. 169

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pranedamedia Group, 2013, Hlm. 197-198

Dalam memberikan pembiayaan *mudhārabah*, KSPS BMT Surya Melati tidak terlalu membatasi hal-hal yang akan dilakukan oleh anggota. Anggota sebagai *mudhārib* berhak memilih usaha yang akan dilakukannya. Dia hanya perlu memberitahukan kepada KSPS BMT Surya Melati tentang spesifikasi usaha yang akan dilakukannya. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pembiayaan *mudhārabah* yang diberikan KSPS BMT Surya Melati kepada anggota tergolong kepada *mudhārabah mutlaqah*.

Dalam DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). Begitu pula pengembalian dana pembiayaan *mudhārabah* yang diberikan kepada KSPS BMT Surya Melati kepada anggota dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara anggota dan pihak KSPS BMT Surya Melati. Tatacara pengembalian dana juga berdasarkan kesepakatan sesuai kemampuan dari anggota.

Walaupun LKS tidak boleh ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi LKS mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Begitu pula KSPS BMT Surya Melati walaupun tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek anggota, tetapi KSPS BMT Surya Melati selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha

anggota. Hal itu untuk mengetahui bagaimana kondisi usaha yang dijalankan oleh anggota.

Dalam pembiayaan *mudhārabah*, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu usaha anggota mengalami untung atau rugi. Kemungkinan itu juga yang akan terjadi kepada anggota yang memperoleh pembiayaan *mudhārabah* dari KSPS BMT Surya Melati. Apabila anggota berhasil dalam menjalankan usahanya, maka KSPS BMT Surya Melati berhak atas bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Tetapi tidak melulu pembiayaan *mudhārabah* yang diberikan kepada anggota mengalami keuntungan. Terkadang walaupun anggota telah maksimal menjalankan usahanya, tetapi usaha yang dijalankannya justru mengalami kerugian.

Ada dua jalan KSPS BMT Surya Melati mengetahui usaha yang dilakukan anggotanya mengalami kerugian. Yang pertama anggota dengan sendirinya melapor kepada KSPS BMT Surya Melati bahwa usahanya mengalami kerugian. Jalan kedua adalah KSPS BMT Surya Melati yang mencari tahu kondisi usaha anggota karena anggotanya beberapa bulan mengalami tunggakan pembayaran. Dalam hal KSPS BMT Surya Melati sudah mengetahui bahwa usaha yang dilakukan anggota mengalami kerugian, KSPS BMT Surya Melati akan melakukan pendekatan kepada anggota yang melaporkan usahanya rugi tersebut. Selanjutnya KSPS BMT

Surya Melati akan mengkaji terlebih dahulu penyebab kerugian yang dialami oleh anggotanya tersebut.

Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab kerugian usaha *mudhārib*, yaitu karena kelalaian dan kesalahan *mudharib* itu sendiri dan bukan karena kesalahan *mudhārib* atau sesuatu diluar dugaan, seperti bencana alam. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian anggota, KSPS BMT Surya Melati tetap menerapkan pembiayaan *mudhārabah* seperti sebelumnya, yaitu anggota masih wajib mengangsur pembayaran perbulannya. Hanya saja KSPS BMT Surya Melati memberikan kelonggaran waktu kepada anggota untuk melunasi sisa angsurannya. Sebagai contoh apabila anggota mengalami kerugian akibat salah manajemen, maka disini anggota masih dibebani kewajiban membayar cicilan perbulannya sebagaimana telah disepakati diawal akad.

Tetapi apabila kerugian *mudhārabah* tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota, maka KSPS BMT Surya Melati mempunyai *i'tikad* baik mengkonversi pembiayaan *mudhārabah* tersebut menjadi akad *qardh*. Mengkonversikan akad *mudhārabah* menjadi *qardh* berarti mengalihkan dari akad *mudhārabah* menjadi akad *qardh*. KSPS BMT Surya Melati melakukan konversi akad *mudhārabah* dengan tujuan untuk membantu anggota menyelesaikan sisa pinjamannya. Sebelum melakukan konversi akad, KSPS BMT Surya Melati akan melakukan rapat direksi apakah pembiayaan itu layak di konversi

atau tidak. Setelah rapat direksi pihak KSPS BMT Surya Melati akan melakukan musyawarah kepada anggota, dan memberi tahu anggota atas kebijakan KSPS BMT Surya Melati tersebut.

Alasan KSPS BMT Surya Melati Melakukan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* dan tidak menanggung kerugian dari pembiayaan *mudhārabah* adalah karena dana yang digunakan untuk pembiayaan *mudhārabah* bukan dana KSPS BMT Surya Melati. Dana yang digunakan untuk pembiayaan *mudhārabah* adalah dana simpanan anggota. Dengan kata lain KSPS BMT Surya Melati Memudhārabahkan dana *mādhārabah*.

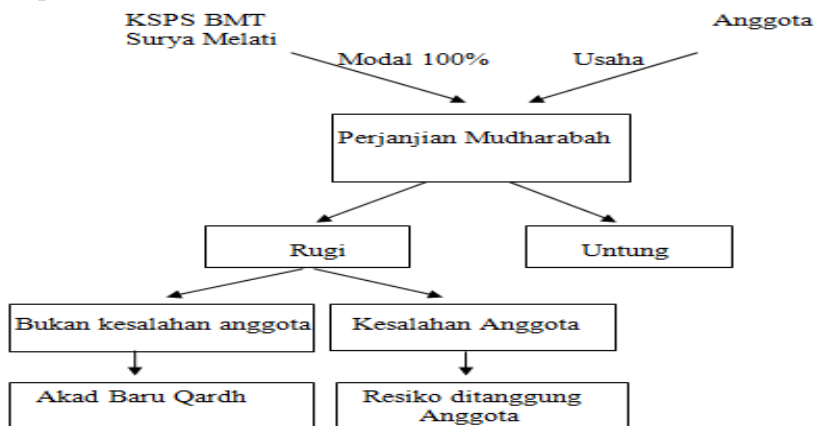
Sebagaimana contoh, konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* yang diterapkan pada pinjaman bapak Sunaryo. Bapak Sunaryo meminjam uang sepuluh juta kepada KSPS BMT Surya Melati untuk usahanya. Bapak Sunaryo memiliki usaha pembuatan roti. Bapak Sunaryo dan KSPS BMT Surya Melati sudah sepakat dari awal bahwa bagi hasil pembiayaan ini adalah 2 %. Dan modal yang dibawa pak sunaryo dikembalikan kepada KSPS BMT Surya Melati dengan dicicil setiap bulannya beserta bagi hasil yang disepakati tersebut. Jangka waktu yang disepakati antara KSPS BMT Surya Melati dan pak Sunaryo adalah 24 bulan atau dua tahun.

Setiap bulan pak Sunaryo membayar cicilan ke KSPS BMT Surya Melati yaitu sebesar Rp. 416.700 ditambah dengan bagi hasilnya Rp.200.000,-. Jadi jumlah yang dibayarkan oleh pak Sunaryo setiap bulan sebesar Rp. 616.700,-. Namun setelah sepuluh

kali cicilan, usaha pembuatan roti pak Sunaryo mengalami kerugian karena rumahnya terbakar. Hal itu menyebabkan pak Sunaryo tidak bisa membayar cicilan ke KSPS BMT Surya Melati. Oleh pihak KSPS BMT Surya Melati pembiayaan *mudhārabah* pak Sunaryo tadi dialihkan ke penyaluran dana *qardh*. Disini pak Sunaryo mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan ke KSPS BMT Surya Melati sejumlah Rp. 417.000,- tiap bulannya.

Ketika diwawancarai tentang pendapatnya, pak Sunaryo mengaku tidak keberatan dengan hal ini. Hal itu dia ungkapkan karena dia tidak terlalu mengetahui tentang pembiayaan ini. Dia tidak mengetahui hak-haknya, hanya dia mengetahui kewajiban yang dia bayarkan adalah sebesar Rp. 616.700,- menjadi 417.000 tiap bulannya. “Saya mah tidak terlalu tahu mengenai hal ini, jadi saya nurut-nurut saja dengan kebijakan bmtnya mbak”.

Berikut adalah skema konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh*:



Konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* ini dilakukan dengan cara pembiayaan mudharabah yang sebelumnya disepakati dianggap seolah-olah sudah berakhir, dan KSPS BMT Surya Melati bersama anggota membuat kesepakatan baru berupa akad *qardh*. Besar dana dalam akad *qardh* ini sesuai dengan sisa pinjaman nasabah dalam pembiayaan *mudhārabah* sebelumnya. Konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* ini tidak dituangkan dalam akad tertulis. Hanya pembiayaan *mudhārabah* dan penyaluran dana *qardh* nya saja yang dituangkan dalam akad tertulis.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Konversi akad mudharabah menjadi Qardh di KSPS BMT Surya Melati

KSPS BMT Surya Melati dalam menangani kerugian *mudhārabah* dengan melakukan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh*. Pada dasarnya konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* yang dilaksanakan oleh KSPS BMT Surya Melati boleh, Asal tidak melanggar aturan-aturan yang telah ada. Hal itu didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

Pada dasarnya hukum yang sudah ada dianggap terus berlaku.

Begitu pula dengan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* yang dilakukan oleh KSPS BMT Surya Melati, diperbolehkan asal tidak melanggar aturan yang telah ada.

1. Analisis Sebab Konversi akad Mudharabah Menjadi Qardh

Mudhārabah pada dasarnya tidak mengenal adanya ganti kerugian, sebab akad mudharabah ini bersifat amanah. *Mudhārib* adalah orang yang mendapatkan amanah (*amin*). Sedangkan orang yang mendapat amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang demikian, akad *qiradh* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *qiradh*.⁴ Hal itu berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ

Artinya:

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw bersabda "*barang siapa dititipi titipan, maka ia tidak menanggung*". (H.R. Ibnu Majah)

Namun jika akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran *kesepakatan*, pihak *mudhārib* dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian.

⁴ Ash-shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa muamalah Kontemporer*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004, hlm. 98

Apabila memang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut tidak karena kelalaian dan kesalahan *mudhārib*, *mudhārib* tidak memiliki tanggung jawab untuk menggantinya.⁵ Dalam hal ini *mudhārib* hanya menanggung kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringat serta waktu yang dikeluarkan selama mengelola usaha.

Praktik konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati terjadi saat *mudhārib* dalam menjalankan *usahanya* mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya. Sebagai contoh apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan usaha *mudhārib* mengalami kerugian dan *mudhārib* tidak bisa mengembalikan modal pembiayaan *mudhārabah* kepada KSPS BMT Surya Melati.

Alasan KSPS BMT Surya Melati Melakukan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* dan tidak menanggung kerugian dari pembiayaan *mudhārabah* adalah karena dana yang digunakan untuk pembiayaan *mudhārabah* bukan dana KSPS BMT Surya Melati. Dana yang digunakan untuk pembiayaan *mudhārabah* adalah dana simpanan anggota yang dipercayakan anggota untuk diusahakan KSPS BMT Surya Melati. Hal itu berarti KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan

⁵ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 221

menggunakan uang simpanan anggota yang untuk dijadikan modal usaha dan dipinjamkan kepada orang ketiga.

Akad semacam itu disebut *memudharabahkan mudharabah*, yaitu si pengelola *memudhārabahkan* modal ini lagi kepada pihak ketiga. Para Ulama' berpendapat bahwa apabila seorang *amil menyerahkan* modal *mudhārabah* kepada pihak lain maka ia wajib menanggung jika mengalami kerugian.⁶ Hal itu berarti alasan KSPS BMT Surya Melati mengkonversi akad tidak bisa diterima, karena dalam hal ini KSPS BMT Surya Melati yang mempunyai kewajiban menanggung kerugian *mudhārabah* ini.

Dalam konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* ini anggota yang mengalami kerugian usaha tidak lagi dibebani dengan pembiayaan *mudhārabah*. Pembiayaan *mudhārabah* yang telah anggota dan KSPS BMT Surya Melati dianggap sudah berakhir, dan dibuat akad baru yaitu akad *qardh*. Dalam konversi akad ini dana yang diperjanjikan dalam kesepakatan baru yaitu penyaluran dana dengan prinsip *qardh* adalah dana pinjaman *mudhārabah* yang sebelumnya masih dipegang anggota. Hal ini berarti bahwa sebenarnya akad *mudhārabah* belum benar-benar berakhir. Karena seharusnya ketika akad *mudhārabah* berakhir, berakhir pula kewajiban anggota untuk mengembalikan dana *mudhārabah* yang dipegangnya.

⁶ Rozalinda, hlm. 206-207

Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan *mudhārabah* yang menegaskan bahwa apabila Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang ditangan *mudhārib*. Akad *mudhārabah* menjadi batal karena modal berkurang atau habis. *Mudhārib* tidak lagi mempunyai kewajiban atas pembiayaan *mudhārabah*.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. O7/DSN-MUI/IV/2000 juga disebutkan bahwa Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁷ *Mudhārib* tidak bertanggungjawab atas kerugian karena pada dasarnya akad *mudhārabah* ini bersifat amanah.

Dalam hal KSPS BMT Surya Melati mengkonversi pembiayaan *mudhārabah* yang mengalami kerugian menjadi akad *qardh*, anggota dibebani kewajiban baru yaitu mengembalikan pinjaman *qardh*. Dana pinjaman *qardh* ini adalah modal yang sebelumnya dalam pembiayaan *mudhārabah* yang belum dikembalikan anggota kepada KSPS BMT Surya Melati karena anggota mengalami kerugian.

Hal itu berarti KSPS BMT Surya Melati sebagai penyedia dana adalah pihak yang seharusnya menanggung kerugian *mudhārabah*, disini anggota tidak boleh menanggung

⁷ Fatwa DSN-MUI No. O7/DSN-MUI/IV/2000

kerugian kecuali apabila anggota melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, serta melanggar kesepakatan. Namun, dalam menangani kerugian *mudhārabah*, KSPS BMT Surya Melati tidak serta merta langsung menggugurkan modal yang masih dibawa oleh anggota. KSPS BMT Surya Melati akan melakukan pengamatan mengenai kerugian yang dialami oleh anggota. Hal ini untuk melihat penyebab kerugian yang dialami oleh anggota, apakah karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja, atau sepenuhnya bukan karena kesalahan anggota sebagai *mudhārib*.

Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian anggota, KSPS BMT Surya Melati tetap menerapkan pembiayaan *mudhārabah* seperti sebelumnya, yaitu anggota masih wajib mengangsur pembayaran perbulannya. Sebagai contoh apabila anggota mengalami kerugian akibat salah manajemen, maka disini anggota masih dibebani kewajiban membayar cicilan perbulannya sebagaimana telah disepakati diawal akad. Apabila kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan *mudhārib*, maka KSPS BMT Surya Melati akan melakukan konversi pembiayaan *mudhārabah* tersebut menjadi akad *qardh*.

Dalam konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh*, anggota mempunyai kewajiban mengembalikan dana yang sebelumnya adalah dana *mudhārabah*. Hanya disini tidak ada bagi hasil yang dibebankan kepada anggota, karena dalam akad *qardh* tidak ada tambahan dalam pengembalian harta pinjaman.

Jangka waktu yang diberikan oleh pihak KSPS BMT Surya Melati kepada anggota dalam pengembalian dana *qardh* ini sesuai dengan kesepakatan baru akad *qardh* dan juga besar pinjaman yang tersisa.

Bila dipandang dari sisi *mudhārabah*, hal itu berarti pihak KSPS BMT Surya Melati tidak *menanggung* kerugian dari kegagalan usaha *mudhārabah* sebelumnya. Karena KSPS BMT Surya Melati pada akhirnya mendapat pengembalian modal *mudhārabah* melalui kesepakatan baru yaitu akad *qardh*. Dan anggota yang seharusnya tidak menanggung kerugian sama sekali, justru dialah yang menanggung kerugiannya, walaupun terbukti bahwa anggota tersebut tidak melakukan kesalahan dan kelalaian.

Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan prinsip dasar *mudhārabah* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhārabah* (*qiradh*). Karena dengan mengkonversi akad bisa dibilang KSPS BMT Surya Melati tidak menanggung kerugian sama sekali. Justru anggota yang seharusnya tidak mempunyai tanggung jawab menanggung kerugian yang menanggung semua kerugian pembiayaan *mudhārabah*.

Dari pemaparan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa KSPS BMT Surya Melati dalam melaksanakan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* tidak

sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhārabah* (qiradh). Hal itu karena dalam pembiayaan *mudhārabah* tersebut bukan KSPS BMT Surya Melati yang menanggung kerugian usaha *mudhārabah*, dalam pelaksanaannya penentuan ganti rugi akad pembiayaan *mudhārabah* yang dilakukan oleh KSPS BMT Surya Melati seluruhnya ditanggung oleh *mudharib* baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *mudharib* maupun resiko yang terjadi akibat dari kerusakan alam.

2. Syarat dan Rukun Konversi akad Mudharabah Menjadi Qardh

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa *mudhārabah* itu sah secara hukum islam atau secara syar'i jika telah memenuhi syarat dan rukun *mudhārabah*. Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun *mudhārabah* ada enam⁸, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibul māl*);
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang-barang yang diterima dari pemilik barang (*mudhārib*);
3. Akad *Mudhārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal;

⁸ Hendi Suhendi, , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 139

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.⁹

Sedangkan syarat-syarat *mudhārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudhārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudhārabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai;
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharuf, maka dibatalkan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan;
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat;
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan dibagi dua dan kabul dari pengelola;

⁹ Ibid, hlm. 140

6. *Mudhārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudhārabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudhārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* itu rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal *mudhārabah* tersebut sah.

Rukun akad *mudhārabah* dalam pelaksanaan akad pada pembiayaan *mudhārabah* di KSPS BMT Surya Melati dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*shahibul māl*) dan pengelola (*mudhārib*). Penyedia dana (*Shahibul māl*) yaitu pihak KSPS BMT Surya Melati, dan sebagai pengelola (*mudhārib*) adalah pihak anggota yang mengajukan pembiayaan *mudhārabah*.
- b. Pernyataan ijab dan qabul ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *mudhārabah* antara anggota dan KSPS BMT Surya Melati.
- c. Modal yaitu sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pihak KSPS BMT Surya Melati selaku *shahibul māl* dengan pihak anggota selaku *mudhārib* untuk modal usaha anggota.

- d. Keuntungan yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* ini adalah keuntungan dari hasil usaha yang dikelola oleh *mudhārib*.
- e. Kegiatan usaha yaitu suatu pekerjaan atau tenaga yang dikeluarkan oleh *mudhārib* untuk mengelola usahanya dari awal sampai akhir.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan rukun *mudhārabah* dalam aplikasinya di KSPS BMT Surya Melati sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Begitu pula dengan syarat-syaratnya. Adapun syarat pembiayaan *mudhārabah* dalam pelaksanaannya di KSPS BMT Surya Melati dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai
Pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* pada sektor pertanian di KSPS BMT Surya Melati yang berkaitan dengan ketentuan modal sudah memenuhi syarat yang disebutkan di atas. Syarat tersebut yaitu modal berbentuk uang dan diketahui jumlahnya (bukan berbentuk piutang), dan modal yang diberikan 100%. Diberikan oleh KSPS BMT Surya Melati secara tunai kepada anggota yang mengajukan pembiayaan *mudhārabah*.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuf*,

Akad *mudhārabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak KSPS BMT Surya Melati dengan anggota yang mengajukan pembiayaan *mudhārabah* haruslah cakap hukum, berakal dan *mumayyiz*. Subyek hukum tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga badan hukum. Pihak KSPS BMT Surya Melati adalah sebagai pihak pemberi modal (*shahibul māl*) dan berbentuk badan hukum yang sah, maka KSPS BMT Surya Melati tersebut sah untuk bertindak sebagai *shahibul māl* dalam transaksi *mudhārabah*. Pihak *mudhārib* yaitu anggota yang mengajukan pembiayaan *mudhārabah*. Ketentuan sebagai anggota juga sama sebagaimana yang disyaratkan di atas, yaitu cakap hukum, berakal, dan *mumayyiz*. Pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* di KSPS BMT Surya Melati telah disyaratkan. Anggota haruslah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), artinya nasabah harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka sudah dapat membuktikan bahwa anggota sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan

kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati;

Modal yang diberikan oleh KSPS BMT Surya Melati diketahui dengan jelas jumlahnya oleh kedua belah pihak. Karena modal diberikan tunai oleh KSPS BMT Surya Melati dan tidak dalam bentuk cicilan.

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* pada pembiayaan sektor pertanian di KSPS BMT Surya Melati dalam menentukan bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara KSPS BMT Surya Melati dan anggota. Keuntungan yang disyaratkan dalam pembiayaan *mudhārabah* di KSPS BMT Surya melati ini dinyatakan dengan bentuk persentase dan jelas bagiannya masing-masing pihak.

- e. Melafadzkan ijab dari *shahibul māl* dan *mudharib*

Ijab qabul pembiayaan *mudhārabah* di KSPS BMT Surya Melati ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *mudharabah*. Pembiayaan untuk usaha pertanian yang terdapat di KSPPS

- f. Mudhārabah bersifat mutlak

Pembiayaan *mudhārabah* yang terjadi di KSPS BMT Surya Melati adalah *mudhārabah* mutlaqah. Dalam hal ini berarti

KSPS BMT Surya Melati telah memenuhi syarat ke-6 yaitu *mudhārabah* harus bersifat mutlak.

Ketika akad *mudhārabah* tersebut dikonversikan menjadi *qardh*, maka harus memenuhi syarat dan rukun *qardh*. Sedangkan syarat dan rukun *qardh* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Muqridh* (pemberi hutang);
- b. *Muqtaridh* (orang yang berutang);
- c. *Ma'qud alaih* (barang yang diutang);
- d. *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima).¹⁰

Sedangkan syarat-syarat *qardh* adalah:

- a. *Muqtarid* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian;
- b. *Harta muqtarid berasal dari harta mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan;
- c. *Ada serah terima barang, karena qardh merupakan bagian dari tabarru'*, sedangkan hanya sempurna dengan adanya serah terima barang;
- d. *Qardh itu memberikan manfaat kepada muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqtarid mensyaratkan*

¹⁰ Rozalinda, , *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, Hlm. 232

adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.

Jika dilihat dari syarat dan rukun akad *qardh* di atas, maka konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah, karena syarat dan rukun akad *mudhārabah* memenuhi syarat dan rukun akad *qardh*. KSPS BMT Surya Melati yang dalam pembiayaan *mudhārabah* bertindak sebagai *shahibul māl*, dalam akad *qardh* beralih menjadi *muqridh*. Sedangkan anggota yang dalam akad *mudhārabah* menjadi *mudharib*, dalam akad *qardh* ini beralih menjadi *muqtaridh*. Dalam konversi akad tersebut terjadi *sighat ijab qabul* dari pihak KSPS BMT Surya Melati kepada anggota. Harta yang dikonversikan juga jelas jumlah dan takarannya.

3. Analisis Jaminan pada Konversi akad Mudharabah menjadi Qardh

Jaminan (*rahn*) adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.¹¹ Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. ke-1, 2009, hlm. 242.

disebut *rāhin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

KSPS BMT Surya Melati dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* mensyaratkan adanya jaminan atau biasa disebut dengan agunan. Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan *mudhārabah* ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudhārabah* yang dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudhārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudhārib* tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari *Mudhārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudhārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

KSPS BMT Surya Melati meminta jaminan kepada anggota hanya untuk berjaga-jaga agar anggota tidak melakukan penyimpangan. Jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian.

Ketika KSPS BMT Surya Melati melakukan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh*, jaminan yang berada di pihak KSPS BMT Surya Melati tidak dikembalikan kepada anggota.

Jaminan yang sebelumnya digunakan sebagai agunan pembiayaan *mudhārabah*, setelah akad dikonversikan menjadi *qardh* dijadikan sebagai jaminan *qardh*. Jaminan dalam akad *qardh* ini tetap dibawa oleh pihak KSPS BMT Surya Melati sampai akad *qardh* berakhir. Hal ini dilakukan oleh KSPS BMT Surya Melati untuk berjaga-jaga apabila anggota lalai dalam mengembalikan pinjaman dana *qardh* atau anggota yang sebenarnya mampu membayar pinjaman dana *qardh* tetapi mempunyai *i'tikad* buruk tidak mengembalikan dana *qardh* tersebut.

Penggunaan jaminan dalam akad *qardh* ini berdasarkan fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang dinyatakan dalam poin 4 bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.¹² Jaminan ini hanya untuk berjaga-jaga apabila anggota yang sebenarnya mampu mengembalikan dana *qardh* tetapi menunda-nunda pembayarannya atau mempunyai *i'tikad* baik untuk tidak mengembalikan dana pinjaman *qardh*.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* yang ada di KSPS BMT Surya Melati telah dengan sesuai bila ditinjau dari sisi jaminan. Karena pada kedua akad tersebut, yaitu sama-sama memperbolehkan adanya jaminan. Fungsi dari jaminan dari kedua akad ini juga

¹² Fatwa DSN-MUI No. : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*.

sama, yaitu untuk prinsip berhati-hati atau berjaga-jaga ketika anggota lalai dalam mengembalikan dananya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* di KSPS BMT Surya Melati dilakukan apabila anggota mengalami kerugian *mudhārabah* tidak karena kelalaian dan kesalahan anggota. Alasan KSPS BMT Surya Melati melakukan konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* karena dana yang digunakan untuk pembiayaan *mudhārabah* adalah dana anggota. Konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* ini dilakukan dengan cara pembiayaan *mudhārabah* yang sebelumnya disepakati dianggap sudah berakhir, dan KSPS BMT Surya Melati bersama anggota membuat kesepakatan baru berupa akad *qardh*. Besar dana dalam akad *qardh* ini sesuai dengan sisa pinjaman nasabah dalam pembiayaan *mudhārabah* sebelumnya.
2. Dilihat dari syarat dan rukun akad *mudhārabah* dan akad *qardh*, maka konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah. Begitu pula ditinjau dari sisi jaminan, konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh* sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah. Namun ditinjau dari sebab konversi akad *mudhārabah* menjadi *qardh*, konversi akad

mudhārabah menjadi *qardh* yang dilakukan KSPS BMT Surya Melati untuk anggota yang mengalami kerugian *mudhārabah* bukan karena kesalahan dan kelalaian anggota tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhārabah* (*qiradh*). Hal itu karena dalam pembiayaan *mudhārabah* tersebut bukan KSPS BMT Surya Melati yang menanggung kerugian usaha *mudhārabah*, tetapi malah anggota yang menanggung kerugiannya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Para akademisi hendaknya perlu mengkaji lebih lanjut tentang produk pembiayaan *mudhārabah* sehingga praktek pembiayaan ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
2. KSPS BMT Surya Melati hendaklah berhati-hati dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI dalam setiap produk-produknya, seperti pada produk pembiayaan *mudhārabah*. KSPS BMT Surya Melati harus menggunakan akad yang tepat sesuai dengan fatwa. KSPS BMT Surya Melati sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah supaya menerapkan kepercayaan kepada anggota pembiayaan *mudhārabah*. Serta memberikan pengetahuan

kepada anggota tentang hak-hak dan kewajiban yang harus diterimanya.

3. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia hendaklah menghimbau kepada Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan implementasi fatwa terhadap produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian antara fatwa dengan praktek di Lembaga Keuangan Syari'ah.
4. Anggota harus lebih memahami akad pembiayaan *mudhārabah* yang telah disepakati bersama dengan KSPS BMT Surya Melati, supaya anggota paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang maha pengasih dan maha mengetahui serta berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka mengakhiri masa studi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah dengan lancar, semoga dapat memberikan kontribusi positif untuk keluarga, agama dan negara, Amiin.

Penulis juga menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kemampuan penulis yang dhaif ini, maka bila ada kesalahan

dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun kata yang jauh dari kesempurnaan dan bila ada kebenaran dari skripsi ini semata-mata petunjuk dari Allah SWT, tetapi jika ada kesalahan dan kekurangan itu merupakan kekurangan dan keterbatasan pengetahuan penulis.

Dengan demikian penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dan positif demi kebaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang. Akhir dari kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing sampai selesainya skripsi ini. Dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang telah membantu dengan ikhlas, khususnya kepada keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangat sampai akhir. Penulis hanya bisa menyampaikan *Jaza Kumullah Akhsanal Jaza'*.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat pada diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, AMIN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali , Zainudin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Al-Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar, 314 H. *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, Jakarta: Al-Birr Press

Al-Asqalany, Imam Ibnu Hajar, 2015. *Bulughul maram*, diterjemahkan Lutfi Arif dkk, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika)

Al-Gharyani, Ash-shadiq Abdurrahman, 2004. *Fatwa-fatwa muamalah Kontemporer*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif

Amiruddin, Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani

Ashshofa, Burhan, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Fahmi, Irfan, 2015. *Managemen Perbankan Konvensional dan Syari'ah*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Fathoni, Abdurrahmat, 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta

- Hasanah, Neneng Nur, 2015. *Mudharabah dalam teori dan praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ilmi, Makhalul, 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press
- Ismail, 2011. *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Janwari, Yadi, 2015. *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pranamedia Group
- Muhammad, Nadzir, 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moloeng, Lexy J, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya
- Nasir, Moh, 1999. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia
- Rachmat, Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Rozalida, 2016. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid, 2009. *Fikih Sunnah*, jilid 5, Cet. ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing

- Satori, Djama'an dan Aan Komariah, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Shalihin, Ahmad Ifham, 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, 2010. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Utsman, Rachmadi, 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah*, Bandung: PT Citra Adikarya Bakti
- Yunus, Jamal Lulail, 2000. *Managemen Bank Syari'ah Mikro*, Malang: UIN-Malang Press
- Zuhdi, Masjuk, 1993. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung

Jurnal

- Murtadlo, Ali, 2012. *Menelaah Mudharabah sebagai acuan Kerja Perbankan*, Semarang: Al-Ahkam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- Ulfa, Ahya Faridatun, 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengalihan Tanggung Jawab Risiko Pembiayaan Macet di KJKS BMT Al-Fath Pati*, UIN Walisongo Semarang,

Uula, Laili Tsulutsul, 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT UMMAT Wonosari Gunungkidul Jogjakarta*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nisa, Inayatun, 2016. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Produk Sektor Pertanian (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)*, UIN Walisongo Semarang

Wawancara

Wawancara dengan ibu Nur Khasanah, S.E selaku Kabag. Organisasi KSPS BMT Surya Melati, Selasa, 21 Maret 2017

Internet

<http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/11/PERMEN-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-kegiatan-uspps-oleh-koperasi.pdf>, Selasa, 7 Februari 2017, 07.52 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH
KSPS "BMT SURYA MELATI"

Badan Hukum : 115 / BH / KK-4 / XII . 2001
Jalan Pemuda No. 55 Gubug, Grobogan. Telp/Fax (0292) 533230



Surat Keterangan

Nomor : 013/KSPS-SM/V/2017

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurkhasanah, SE.

Jabatan : Kabag. Organisasi

Menyatakan Bahwa Mahasiswa :

Nama : Siti Zulaikah

Nim : 132311018

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI AKAD

MUDHARABAH MENJADI QARDH DI KSPS BMT SURYA MELATI

GUBUG GROBOGAN

Telah melakukan riset di KSPS BMT Surya Melati sejak tanggal 08 Februari sampai 20 April 2017.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Grobogan, 20 April 2017

Kabag. Organisasi

Nurkhasanah, SE

Wawancara dengan Pihak KSPS BMT Surya Melati

1. Apa saja produk yang ada di KSPS BMT Surya Melati?

Produk yang ada di KSPS BMT Surya Melati bermacam-macam, untuk penghimpunan dana kami menawarkan tabungan SISUKA, SIRELA, SISIMPUN, TASITA dan TASAQUR. Sedangkan untuk penyaluran dana ada produk penyaluran dana dengan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *bai' bi 'tsama 'ajil*, *musyarakah* dan *qardh*.

2. Apa produk yang diminati di KSPS BMT Surya Melati?

Produk yang banyak diminati masyarakat adalah *mudharabah*.

3. Bagaimana bentuk pembiayaan mudharabah di KSPS BMT Surya Melati?

Pembiayaan mudharabah di KSPS BMT Surya melati diberikan untuk anggota yang membutuhkan modal usaha, untuk bagi hasilnya di bagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dicicil setiap bulannya oleh anggota.

4. Apa saja syarat-syarat bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* di KSPS BMT Surya Melati?

Syarat bagi calon nasabah adalah Fotocopy KTP Suami dan istri, fotocopy KK, dan Fotocopy Jaminan (fotocopy BPKB dan STNK terbaru atau fotocopy sertifikat dan PBB).

5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KSPS BMT Surya Melati dalam pembiayaan *mudharabah*?

Sejauh ini tidak banyak kendala yang dihadapi KSPS BMT Surya Melati dalam pembiayaan mudharabah.

6. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di KSPS BMT Surya Melati?



Sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Jadi dalam perjanjian awal terjadi tawar menawar bagi hasil, sampai ditentukan bagi hasil yang disepakati.

7. Apabila kedepannya usaha yang dilakukan oleh anggota gagal bagaimana kebijakan KSPS BMT Surya Melati?

KSPS BMT Surya Melati akan melihat penyebab anggota gagal menjalankan usahanya, apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh kelalaian anggota dalam menjalankan usahanya, maka disini anggota masih diwajibkan membayar cicilan setiap bulannya. Tetapi apabila kegagalan usahanya tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota, maka KSPS BMT Surya Melati mempunyai i'tikad baik untuk mengkonversikan pembiayaan mudharabah tersebut menjadi penyaluran dana dengan prinsip qardh.

8. Bagaimana skema konversi akad dari mudharabah menjadi *qardh*?

Jadi disini pembiayaan mudharabah yang sebelumnya disepakati dianggap seolah-olah sudah selesai kemudian dibuat akad baru yaitu akad *qardh*.

9. Barapa lama jangka waktu yang diberikan KSPS BMT Surya melati kepada anggota dalam mengembalikan pinjaman dana *qardh*?

Jangka waktu yang diberikan KSPS BMT Surya Melati kepada anggota adalah sesuai kesepakatan dan kesanggupan dari anggota, mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun.



| PEMBIAYAAN | ANGSURAN | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | Musiman |
| 1.000.000 | 103.333 | 75.556 | 61.667 | 30.000 |
| 2.000.000 | 206.667 | 151.111 | 123.333 | 60.000 |
| 3.000.000 | 310.000 | 226.667 | 185.000 | 90.000 |
| 4.000.000 | 413.333 | 302.222 | 246.667 | 120.000 |
| 5.000.000 | 516.667 | 377.778 | 308.333 | 150.000 |
| 6.000.000 | 620.000 | 453.333 | 370.000 | 180.000 |
| 7.000.000 | 723.333 | 528.889 | 431.667 | 210.000 |
| 8.000.000 | 826.667 | 604.444 | 493.333 | 240.000 |
| 9.000.000 | 930.000 | 680.000 | 555.000 | 270.000 |
| 10.000.000 | 1.033.333 | 755.556 | 616.667 | 300.000 |
| 11.000.000 | 1.136.667 | 831.111 | 678.333 | 330.000 |
| 12.000.000 | 1.240.000 | 906.667 | 740.000 | 360.000 |
| 13.000.000 | 1.343.333 | 982.222 | 801.667 | 390.000 |
| 14.000.000 | 1.446.667 | 1.057.778 | 863.333 | 420.000 |
| 15.000.000 | 1.550.000 | 1.133.333 | 925.000 | 450.000 |
| 16.000.000 | 1.653.333 | 1.208.889 | 986.667 | 480.000 |
| 17.000.000 | 1.756.667 | 1.284.444 | 1.048.333 | 510.000 |
| 18.000.000 | 1.860.000 | 1.360.000 | 1.110.000 | 540.000 |
| 19.000.000 | 1.963.333 | 1.435.556 | 1.171.667 | 570.000 |
| 20.000.000 | 2.066.667 | 1.511.111 | 1.233.333 | 600.000 |
| 21.000.000 | 2.170.000 | 1.586.667 | 1.295.000 | 630.000 |
| 22.000.000 | 2.273.333 | 1.662.222 | 1.356.667 | 660.000 |
| 23.000.000 | 2.376.667 | 1.737.778 | 1.418.333 | 690.000 |
| 24.000.000 | 2.480.000 | 1.813.333 | 1.480.000 | 720.000 |
| 25.000.000 | 2.583.333 | 1.888.889 | 1.541.667 | 750.000 |
| 30.000.000 | 3.100.000 | 2.266.667 | 1.850.000 | 900.000 |
| 35.000.000 | 3.616.667 | 2.644.444 | 2.158.333 | 1.050.000 |
| 40.000.000 | 4.133.333 | 3.022.222 | 2.466.667 | 1.200.000 |
| 45.000.000 | 4.650.000 | 3.400.000 | 2.775.000 | 1.350.000 |
| 50.000.000 | 5.166.667 | 3.777.778 | 3.083.333 | 1.500.000 |

NB : Sesuai dengan Prosedur &
Melalui Proses Survei.

Dokumentasi



KSPS BMT Surya Melati Gubug Grobogan



Wawancara dengan Kabag. Organisasi Ibu Nur Khasanah

RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Zulaikah
Tempat/tgl. Lahir : Grobogan, 20 Oktober 1994
Alamat : RT 02/06 Kelurahan Kuwaron Kecamatan
Gubug Kabupaten Grobogan

Jenjang pendidikan

- Madrasah Ibtidaiyah negeri 01 Gubug Lulus Tahun 2006
- MTs N 01 Jeketro Gubug Lulus Tahun 2010
- MAN 01 Semarang Lulus Tahun 2013
- Program Strata 1 fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang angkatan 2013

Demikian daftar riwayat hidup penulis yang ditulis dengan sebenarnya.

Semarang, 20 July 2017

Siti Zulaikah